



Nunung Ghoniyah

**Masalah Sosial Ekonomi
Perbankan Syariah di Indonesia:
Pencapaian Dalam
*Sustainable Development Goals***

UNISSULA PRESS
Semarang

**Masalah Sosial Ekonomi Perbankan
Syariah di Indonesia:
Pencapaian dalam *Sustainable Development Goals***

NUNUNG GHONIYAH

**Unissula Press
Semarang**

Masalah Perbankan Syariah di Indonesia: Pencapaian dalam *Sustainable Development Goals*

Oleh: Nunung Ghoniyah

ISBN: 978-623-7097-53-2

Cetakan Pertama: 22 Juni 2020

Diterbitkan oleh:

Unissula Press
Semarang

Dicetak oleh :

Sultan Agung Press (SAPRESS)

KATA PENGANTAR

Bismillah hirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum wr wb.

Puji syukur yang tak terhingga kepadaMu ya Allah, atas segala nikmat yang Engkau berikan. Sholawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sanak keluarga, para sahabatnya dan kepada seluruh ummatnya yang setia menegakkan apa yang telah diperintahkannya, sampai akhir zaman. Berkat karuniaNya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan buku Monograf ini. Semoga Allah selalu meridloi dan memberkahi dan melindungi setiap langkah saya.

Peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi sudah banyak dikaji. Perbankan merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Perbankan termasuk institusi yang memberikan dampak nyata untuk sektor riil. Namun ketika perbankan memiliki tujuan *falah* maka bank akan menuntut laba yang tidak terlalu tinggi dari kredit yang disalurkan. Sehingga dapat memberikan manfaat social dan ekonomi dalam mendukung *Social Development Goals*.

Buku Monograf dengan judul *Maslahah Sosial Ekonomi Perbankan Syariah di Indoseia: Pencapaian Dalam Sustainable Dvelopmment Goals*, ini disusun atas hasil-hasil penelitian saya, dengan tujuan untuk memberikan bukti bagaimana peran/manfaat Perbankan Syariah di Indonesia dalam pencapaian *sustainable development goals*.

Saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian yang melatar belakangi penyusunan buku ini. Ucapkan terima kasih juga saya sampaikan pada rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan kesediaan untuk berbagi pengetahuan dengan tulus, sehingga tersusunnya buku Monograf ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan rekan-rekan dengan limpahan pengetahuan dan keberkahan

Saya menyadari buku Monograf ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas berbagai masukan untuk penyempurnaan buku Monograf ini di masa yang akan datang. Dengan segala keterbatasan buku ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi para pembaca, mahasiswa, masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah dan dunia perbankan khususnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, Aamiin yaa Robbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2020
Penulis,

Dr. Nunung Ghoniyah, MM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
BAB II KERANGKA TEORI PERBANKAN SYARIAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	6
2.1. Perbankan di Indonesia	6
2.1.1. Tujuan Perusahaan dalam Perspektif Spiritual (Islam)	7
2.1.2. Tujuan dan Fungsi Bank.....	9
2.1.3. Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	10
2.2. Perbankan Syariah	13
2.2.1. Kinerja Bank	13
2.2.2. Pembiayaan Bank Syariah dan Penyaluran Kredit Bank Konvensional	16
2.2.3. Kualitas Pembiayaan dan Kualitas Kredit	22
2.3. Sustainable Development Goals	26
2.3.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	29
2.3.2. Indikator SDGs	31
2.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Sustainable Development Goals</i>	33
2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi	35
2.4.1. Teori Supply-Leading Finance Policy	36
2.5. Roadmap Kajian Teoritis	37
2.6. Kerangka Pemikiran	39

BAB III STUDI PENGUJIAN KONSEP TUJUAN MASLAHAH SOSIAL EKONOMI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	40
3.1. Gambaran Umum Perbankan	40
3.2. Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	43
3.3. Analisis Data.....	45
3.3.1. Model Fit Analisis Kuantitatif	45
3.3.2. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>) Analisa Kuantitatif.....	46
3.3.3. Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	48
3.4. Implikasi Perbankan Syariah pada SDGs.....	50
3.4.1. Dampak Spesifik Perbankan Syariah pada SDGs	51
 BAB IV PERAN STRATEGIS PERBANKAN SYARIAH	 59
4.1. Perbedaan kontribusi Bank Syariah terhadap SDGs dengan dampak Bank Konvensional terhadap SDGs	59
4.2. Pengaruh Pembiayaan atau Kredit terhadap SDGs...	61
4.3. Pengaruh Moderasi Kualitas Pembiayaan antara Laba Perbankan dengan SDGs	64
 BAB V PENUTUP	 68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Implikasi Teoritis	68
5.3. Implikasi Manajerial.....	70
5.4. <i>Disclaimer</i>.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Gambaran Umum Perbankan di Indonesia	41
Tabel 3.2. Gambaran Umum Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	44
Tabel 3.3. General Output, Model Fit Indices and P values	45
Tabel 3.4. <i>Indicator Weights</i>	47
Tabel 3.5. <i>Full collinearity VIFs</i>	47
Tabel 3.6. <i>Latent Variable Coefficient</i>	50
Tabel 3.7. <i>Path coefficients</i>	52
Tabel 3.8. P Values	52
Tabel 3.9. <i>Standard Error</i>	53
Tabel 3.10. <i>Indirect Effect</i>	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Roadmap</i> Kajian Teoritis	38
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	40
Gambar 3. Model Hasil Penelitian.....	55
Gambar 4. Hasil Sobel Test d_shariah → Profits → SDGs	57
Gambar 5. Hasil Sobel Test Credits → Profits → SDGs	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi agenda Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk tingkat internasional, yang diikuti oleh 194 negara (Financial Ferivices Authority, 2017). Indonesia adalah salah satu negara yang telah menyepakati penerapan SDGs. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup instansi pemerintah dan swasta termasuk perbankan, ikut dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia (Central Bureau of Statistics, 2016).

Perbankan termasuk institusi yang memberikan dampak nyata untuk sektor riil (Adekola, 2016; Robinson, 2001). Hal tersebut telah dibuktikan oleh (Adekola, 2016) dalam penelitiannya pada perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Di Indonesia, perbankan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak, tujuan sosial perbankan tersebut telah tertuang dalam perundang-undangan sejak abad 19 (Law No.10 of 1998 - Amendment to Law No. 7 Yr 1992 concerning Banking, 1998). Karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan sejalan dengan tujuan dasar adanya perbankan di Indonesia.

Kedudukan perbankan juga dapat merujuk pada teori *supply leading policy* atau *supply leading finance* (Abusharbeh, 2017).

Teori ini menjelaskan posisi bank sebagai pemasok modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil (Zamzami, 2011).

Pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama perbankan, sesuai Undang-undang dan didukung oleh ahli ekonomi spiritual (ekonomi Islam) seperti (Muhamad, 2016), Chapra (1970) dan Al Habshi dalam (Muhamad, 2016). (Alkhazaleh, 2017) membuktikan bahwa perbankan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Sebagai pembuktian tujuan falah (tujuan sosial), maka perlu memperhatikan kualitas laba yang dihasilkan oleh perbankan, yakni dengan memperhatikan manajemen risiko perbankan. Karena laba perbankan yang rendah bisa saja memang karena tujuan perbankan untuk berkontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi, atau karena pada saat itu kondisi kesehatan maupun kualitas pembiayaan bank sedang buruk (Adekola, 2016). Secara lebih spesifik, bank syariah di Uni Emirat Arab (UEA) baru menguasai 19,6% *market share* (Okezone.com, 2017) akan tetapi mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di UEA/UAE (United Arab Emirates) (Tabash dan Anagreh, 2017), yakni melalui pembiayaan yang diberikan. Meskipun demikian, di daerah Utara Afrika dan Timur Tengah (Middle East and North Africa/MENA), pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih amat lemah (Goaied & Sassi, 2011).

Ketika perbankan memiliki tujuan falah maka bank akan menuntut laba yang tidak terlalu tinggi dari kredit yang disalurkan, sehingga kreditur atau nasabah pembiayaan tidak terlalu terbebaskan oleh kewajiban yang harus mereka

serahkan pada pihak bank, dan selanjutnya nasabah akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengelola lebih banyak aset di sektor riil (Murerwa, 2015). Hal tersebut terjadi di negara berkembang seperti Nigeria di mana perbankan menuntut laba rendah dan mampu memberikan stimulan untuk pertumbuhan ekonomi negara (Adekola, 2016).

Meskipun demikian, perbankan yang berorientasi pada laba merupakan hal yang krusial agar dapat memberikan *feedback* untuk nasabah, serta dapat meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk menyimpan dana di bank (Klein & Weill, 2018). Karena itu perbankan tetap dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian negara dengan menciptakan prestasi yang baik. Yaitu dengan mengumumkan pencapaian laba yang tetap tinggi (Alkhazaleh, 2017; Klein & Weill, 2018).

Perbedaan perspektif upaya meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan juga muncul dari adanya dua sistem perbankan yang berbeda. Sejak tahun 1997, Indonesia menerapkan dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan bank Islam (bank syariah). Orientasi bisnis Islam yang tidak hanya mementingkan laba perusahaan menjadi prinsip mutlak yang harus diterapkan oleh bank syariah. Dengan kata lain perusahaan seharusnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan atau kesejahteraan seluruh umat (Muhamad, 2016). Karena itu kecenderungan dari bank syariah ialah menuntut laba perusahaan yang rendah agar tidak membebani masyarakat, sebagai upaya menstimulus peningkatan perekonomian (Ghonyah & Hartono, 2019a).

Terlebih lagi dengan orientasi bank syariah untuk menyalurkan dana di sektor riil, bukan di sektor keuangan, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa bank konvensional.

Adanya perbedaan perspektif tentang metode berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan negara oleh lembaga perbankan, memunculkan pertanyaan baru bahwa apakah ada perbedaan signifikan antara orientasi perbankan syariah dan orientasi bank konvensional di Indonesia terhadap SDGs. Riset ini merupakan kelanjutan dari riset sebelumnya yang telah membuktikan bahwa bank syariah di Indonesia menuntut laba rendah sebagai stimulan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Hal tersebut dikuatkan dengan rendahnya pembiayaan macet sebagai variabel kontrol. Ketika kualitas pembiayaan buruk (pembiayaan macet tinggi), maka rendahnya laba bank syariah terindikasi karena adanya kinerja perbankan yang buruk. Adapun ketika kualitas pembiayaan baik, maka rendahnya laba yang diminta bank syariah cenderung karena orientasi menstimulus perekonomian Indonesia (Ghonyah & Hartono, 2019a).

Posisi strategis perbankan terutama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, membuat analisis terkait kontribusi bank syariah di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi menarik untuk diteliti. Yakni dengan menganalisis **kontribusi serta tujuan** bank terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan tetap memperhatikan kualitas laba yang diperoleh bank, yakni dengan mengkaitkan kualitas pembiayaan dan kondisi bank sebagai bukti penguat keberhasilan bank dalam berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Adapun analisis

tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana kecenderungan bank syariah dibandingkan bank konvensional, selaku bank yang menggunakan prinsip Islam sebagai dasar bisnisnya. Sekaligus studi ini merupakan studi lanjutan yang sebelumnya meneliti konsistensi bank syariah untuk memiliki tujuan falah tidak hanya dari membayar zakat serta menerapkan CSR, akan tetapi juga dari pola bisnis yang berorientasi kemaslahatan umat (bukan laba perusahaan semata).

BAB II

KERANGKA TEORI PERBANKAN SYARIAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1. Perbankan di Indonesia

Pemerintahan Indonesia mendefinisikan bank dalam (Law No.10 of 1998 - Amendment to Law No. 7 Yr 1992 concerning Banking, 1998) sebagai bentuk badan usaha yang bertugas untuk menyimpan dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit, maupun bentuk-bentuk lainnya, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat menjadil lebih baik lagi. Fungsi bank tersebut menjadikan bank disebut sebagai intermedator atau perantara keuangan (PSAK 31, 2000). Selain bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dan untuk masyarakat, bank juga sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lebih kompleks seperti alat untuk bertransaksi (untuk lalu lintas pembayaran) (Kasmir, 2003). Maka dapat dikatakan bahwa individu maupun atas nama organisasi yang yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan dana tersebut di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, serta deposito, yang mana juga dapat mereka gunakan untuk memperlancar transaksi keuangan mereka. Sementara pihak yang memerlukan dana dapat menerima dana dari bank baik berupa kredit maupun dengan akad yang sesuai dengan ketentuan Islam (bank syariah) (Muna & Ghoniyah, 2013).

2.1.1. Tujuan Perusahaan dalam Perspektif Spiritual (Islam)

Profit maksimal sebagai tujuan utama perusahaan merupakan sudut pandang dari teori ekonomi konvensional (Muhamad, 2016, p. 69). Akan tetapi perlu disadari juga bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri di dunia ini. Ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan perusahaan, serta dukungan masyarakat adalah hal yang penting untuk diperhatikan untuk mempertahankan perusahaan tetap dapat beroperasi. Pengabaian pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat menimbulkan permasalahan (Al Habshi dalam (Muhamad, 2016)). Asumsi tersebut sejalan dengan teori *stakeholder* yang merupakan hasil pendekatan dari *new corporate relation*, dimana pada teori ini perusahaan tidak lagi mengeklusifkan diri dan hanya mementingkan pemegang saham, melainkan merubah tujuan perusahaan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) (Magness, 2008).

Intisari dari ajaran Islam adalah penegakan keadilan serta kebajikan bagi seluruh umat. Islam tidak mengharapkan adanya eksploitasi berlebih untuk mendapat keuntungan, akan tetapi menganjurkan umatnya agar dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat. Hal tersebutlah yang seharusnya mendasari umat Islam untuk terus berusaha dan bekerja dalam mencari rizki Allah SWT, sebagaimana dituangkan dalam QS Al Baqarah 198, QS 62: 10, dan QS 73: 20.

Suatu aktifitas bisnis diharapkan dapat memberikan manfaat (*maslahah*) untuk masyarakat, yang mana ini artinya meskipun

mencari keuntungan tidak dilarang, perusahaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan setinggi-tingginya. Optimalisasi *falah* juga harus menjadi tujuan dalam aktifitas bisnis. Hal ini kembali lagi sejalan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban sosial terutama perusahaan sektor perbankan, yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa untuk menetapkan target keuntungan harus proporsional (Muhamad, 2016, p. 71), dan tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan (Kahf (1973) dan Chapra (1970) dalam (Muhamad, 2016), baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun waktu. Sebagaimana persamaan yang dirumuskan oleh Al Habshi dengan menjadikan F sebagai simbol atas *Falah*/Kemenangan sebagai tujuan akhir setiap kegiatan bisnis (Muhamad, 2016, pp. 73–74). Sebab konsep tujuan *Falah* merupakan sukses di dunia dan akhirat.

$$F = f(X_1, X_2, X_3, Z, \dots X_n)$$

Keterangan:

F: *Falah*/Kemenangan

X1: Profit optimum

X2: harga yang adil

X3: output optimum

Z: Zakat yang dikeluarkan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mencari keuntungan bukanlah hal yang dilarang

dalam Islam, selama tetap mematuhi etika Islami. Etika Islami dalam mencari keuntungan ini adalah selain kita mencari keuntungan materi kita juga harus mencari keuntungan spiritual. Hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk mencari *falah* atau keuntungan dunia dan akhirat (Muhamad, 2016, pp. 73–74).

Konsep yang dirumuskan Al Habsi, melibatkan pembayaran zakat selaku dana filantropi yang harus dikeluarkan umat muslim. Bank Syariah selaku lembaga keuangan yang menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman bisnis pun telah menerapkan kebijakan pembayaran zakat atas usaha mereka, bahkan melakukan CSR yang memiliki implikasi optimal untuk perkembangan peradabat umat terutama umat Muslim (Biyantoro & Ghoniyah, 2019; Chintaman, 2014; Ghoniyah & Hartono, 2019b; Jusoh & Ibrahim, 2017; Samad, Said, Kamarulzaman, Mahshar, & Nasir, 2015), sebagaimana yang telah dilakukan bank syariah-bank syariah di Indonesia.

2.1.2. Tujuan dan Fungsi Bank

Sektor perbankan memiliki peran penting dan dapat mempengaruhi pergerakan dunia usaha.

Karena banyak pihak yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan maupun sebagai sumber pendanaan, baik atas nama individu maupun atas nama organisasi (PSAK 31, 2000) (Muna & Ghoniyah, 2013).

Undang-Undang nomor 10 Th. 1998 menerangkan bahwa pola bisnis perbankan yang menghimpun dan kemudian

menyalurkan dana dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut ditekankan kembali dalam Pada Pasal 4 bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, stabilitas nasional, serta pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah pun mengakui tujuan perbankan tidak hanya untuk memperoleh laba atas tugasnya sebagai intermediasor atau perantara, akan tetapi juga sebagai instansi yang menjembatani ketimpangan keuangan untuk kondisi keuangan yang lebih baik. Dengan posisi bank sebagai intermediasor yang terkoneksi dengan berbagai pihak (Nugroho, 2017), bahkan dari masyarakat atas hingga masyarakat kecil, maka sangat mungkin bagi perbankan untuk memberikan dorongan secara langsung untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Ghonyah & Hartono, 2019a).

2.1.3. Bank Syariah dan Bank Konvensional

Adanya perhatian penting terhadap bentuk perjanjian yang dibuat antara nasabah penyimpan dana maupun dengan nasabah debitur, merupakan ciri utama Bank Syariah. Perjanjian-perjanjian tersebut harus sesuai dengan hukum-hukum Islam yang mana memiliki tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat (*maqashid syariah*) (Biyantoro & Ghonyah, 2019; Ghonyah & Hartono, 2019b; Indonesian Bankers Association, 2014, p. 5). Adapun contoh akad perjanjian lainnya ialah perjanjian berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*), perjanjian berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), sewa

(*ijarah*), serta akad perjanjian *mudharabah* untuk produk deposito bank syariah, maupun untuk akad/perjanjian penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Law No.10 of 1998 - Amendment to Law No. 7 Yr 1992 concerning Banking, 1998; Muna & Ghoniyah, 2013).

Dengan demikian, meskipun bank syariah dengan bank konvensional secara visual akan terlihat tidak memiliki banyak perbedaan, sebenarnya mereka memiliki prinsip dasar dan acuan yang berbeda. Beberapa perbedaan mendasar tersebut ialah pedoman Al Qur'an dan Al Hadits, yang mana menjadi rujukan penyusunan akad-akad atas setiap transaksi yang hendak dilakukan oleh bank syariah, juga menjadi rujukan untuk menyaring setiap transaksi ataupun produk yang tidak dapat ditolerir dalam Islam dikarenakan keharamannya. Maka dapat dikatakan bahwa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah pada umumnya ialah barawal dari pondasi bank syariah, di mana menjadi sumber rujukan, panutan, dan filter dalam menerapkan berbagai dinamika dalam beroperasional.

Pada dasarnya tujuan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya ialah untuk semua jenis bank baik bank yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah. Akan tetapi peran bank konvensional tercoreng oleh praktik kepentingan pribadi sehingga pengelolaan dana digunakan untuk perdagangan uang, serta lebih banyak disalurkan untuk pinjaman jangka pendek dan pribadi. Hal tersebut dianggap tidak menjawab kebutuhan modal ventura sehingga efeknya pada pembangunan ekonomi lebih rendah dari potensi pengaruh sesungguhnya. Sementara itu Bank Syariah memiliki dua hal

yang unggul; pertama, bank syariah menawarkan pinjaman modal lebih banyak untuk proses produksi dengan menggunakan akad kerjasama, ini bertujuan untuk berkontribusi dalam modal perusahaan (Ghoniayah & Wakhidah, 2012). Pengaruh pendanaan untuk produksi lebih efisien daripada alokasi menurut pinjaman murni, dan seiring berjalannya waktu dampak tersebut akan semakin penting untuk pembangunan ekonomi (Goaid, 2014). Kedua, bank syariah menjamin bahwa kontrak mereka tidak akan ada unsur-unsur riba yang mana dilarang dalam Islam (Biyantoro & Ghoniayah, 2019; Ghoniayah & Hartono, 2019b). Lebih lagi, sebagian ekonom percaya bahwa generasi perbankan modern ini mampu memimpin pertumbuhan keuangan yang lebih baik daripada perbankan konvensional (Goaid & Sassi, 2011).

Karakteristik bank syariah lainnya ialah mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral atas suatu usaha secara spesifik, dalam memutuskan suatu permohonan pembiayaan disetujui. Meskipun bisnis di bidang minuman keras dan penjualan tembakau untuk rokok sangat menguntungkan dan memiliki risiko kegagalan yang rendah, akan tetapi memiliki efek jangka panjang yang berbahaya terhadap perekonomian dan lingkungan sosial (Biyantoro & Ghoniayah, 2019; Ghoniayah & Hartono, 2019b; Goaid & Sassi, 2011).

Maka, sebagai perbankan yang menjadikan prinsip Islam sebagai pondasi dasar, juga akan menjadikan tujuan yang sesuai dengan prinsip Islam sebagai visi utama, yakni *falah*, atau kemenangan dunia dan akhirat. Hal tersebut kembali menekankan tugas perbankan yang tidak boleh hanya untuk

mencari keuntungan pribadi, akan tetapi adalah untuk kesejahteraan umat. Secara implisit, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga menjadi salah satu tujuan yang sejalan dengan tujuan perbankan Islam. Serta dengan alokasi penyaluran dana yang didominasi untuk sektor riil menjadikan bank syariah memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi (Ghonyah & Hartono, 2019a).

2.2. Perbankan Syariah

2.2.1. Kinerja Bank

Kinerja bank diukur sebagai bahan evaluasi seberapa baik perusahaan telah menjalankan bisnisnya, baik dalam hal penghimpunan, penyaluran dana, pemberian layanan jasa lainnya, serta manajemen sumber daya (Ghonyah & Aryani, 2018). Adapun salah satu cara sederhana untuk memberikan penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan atau bank ialah dengan melihat tingkat laba yang diperoleh (Jumingan, 2011).

2.2.1.1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang paling komprehensif dari keseluruhan rasio yang ada dan rasio ini menggambarkan kemampuan bank untuk bertahan dan stabil dalam melanjutkan operasionalnya di kemudian hari. (Harahap & Yusuf, 2005) menjelaskan rasio profitabilitas atau bisa juga disebut rentabilitas, merupakan gambaran kapasitas perusahaan untuk memperoleh laba melalui berbagai kebijakan bisnis dan pengelolaan modal, seperti peningkatan kemampuan sumber

daya, pemanfaatan kas secara optimal, manajemen ekuitas, penambahan atau pemangkasan jumlah karyawan dan jumlah cabang, dan sebagainya. Profitabilitas juga dikatakan mampu menunjukkan efektifitas kinerja manajemen (Kasmir, 2003).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu dengan mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya seperti aset dan modal secara efektif dan efisien.

2.2.1.2. Indikator Profitabilitas

Profitabilitas dapat dicerminkan dari berbagai rasio seperti *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Return On Assets* (OPROA), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Equity* (ROE), *Return On Asset* (ROA), dan *Operating Ratio* (OR). Adapun pada penelitian ini profitabilitas akan menggunakan proksi ROA (*Return on Asset*).

Return on asset dihitung dari perbandingan antara laba yang diperoleh oleh bank dengan total aset. Laba yang dimiliki perusahaan perbankan khususnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni laba operasional atau laba atas aktivitas utama, laba non operasional yang umumnya merupakan laba atas layanan jasa yang diberikan, laba usaha yang merupakan akumulasi atas berbagai jenis laba berdasarkan sumbernya, serta laba bersih.

Adapun pada penelitian ini merujuk (Ferdyant, Ratna Anggrani ZR, & Erika Takidah, 2014) yang mana menggunakan laba bersih sebelum pajak, sementara total aset yang digunakan adalah rata-rata total aset. Pemilihan rata-rata total aset sebagai penilaian atas laba yang diperoleh oleh bank adalah karena adanya kemungkinan yang tinggi atas fluktuasi dana pihak ketiga, yakni dana masyarakat yang ada di bank tersebut, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Usaha Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber: (Ferdyant et al., 2014)

2.2.1.3. Profitabilitas Bank dan SDGs

Secara spiritual, Al Habshi menekankan tujuan utama suatu perusahaan adalah falah (dalam (Muhamad, 2016)). Revolusi industri yang ada pun semakin menguatkan bahwa perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan dirinya sendiri dan mengabaikan lingkungan sekitar, yang mana ditunjukkan dengan munculnya kewajiban-kewajiban perusahaan untuk melakukan suatu bentuk pertanggungjawaban sosial. Bahkan Undang-Undang tentang perbankan menegaskan bahwa perbankan memiliki fungsi dan dampak sosial yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Eksistensi perbankan dapat mendorong pertumbuhan bisnis di sektor riil hingga akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta dampak lainnya seperti meningkatnya lapangan pekerjaan, peningkatan daya beli masyarakat, dan bentuk kesejahteraan lainnya (Abusharbeh, 2017; Adekola,

2016; Robinson, 2001; Zamzami, 2011). Hal tersebut sejalan dengan tujuan perbankan di Indonesia (Law No.10 of 1998 - Amendment to Law No. 7 Yr 1992 concerning Banking, 1998). Revolusi industri yang ada pun semakin menguatkan bahwa perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan dirinya sendiri dan mengabaikan lingkungan sekitar, yang mana ditunjukkan dengan munculnya kewajiban-kewajiban perusahaan untuk melakukan suatu bentuk pertanggungjawaban sosial. Adapun upaya pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat banyak dapat dilakukan oleh perbankan dengan menuntut laba perusahaan yang lebih rendah (Adekola, 2016; Ghoniyah & Hartono, 2019a; Murerwa, 2015).

Hasil penelitian dari (Adekola, 2016) yang meneliti di Nigeria dan (Alkhazaleh, 2017) yang meneliti di Jordania, menegaskan bahwa sektor perbankan di negara-negara tersebut telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. (Murerwa, 2015) pun menegaskan bahwa perbankan akan menuntut laba yang lebih rendah supaya perekonomian masyarakat dapat bertumbuh lebih lincah, karena beban bunga, margin, atau bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah pembiayaan/kredit kepada pihak bank lebih kecil.

2.2.2. Pembiayaan Bank Syariah dan Penyaluran Kredit Bank Konvensional

Filosofi kredit bank konvensional berbeda dengan pembiayaan pada bank syariah. Penyaluran kredit dana untuk mendapatkan keuntungan bagi bank, sedangkan pembiayaan merupakan bagian dari *function of agent* karena memperoleh mandat dari pemilik modal (*mudharib*) untuk mengelola dananya sebagai

suatu amanah yang harus dijalankan secara baik (Ghoniayah & Setyowati, 2019; Indonesian Bankers Association, 2015, p. 26).

Pada prinsipnya fungsi pokok perbankan adalah menyalurkan kredit, kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan utama perbankan (Ghoniayah & Setyowati, 2019; Ghoniayah & Wakhidah, 2012). Begitu pula dengan bank syariah, kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu penyaluran pembiayaan juga merupakan sumber pendapatan utama bank syariah (Indonesian Bankers Association, 2015, p. 2). Meski menjadi sumber pendapatan utama bank syariah, mereka tetap perlu memperhatikan tujuan bersama kegiatan penyaluran pembiayaan tersebut, yakni untuk meningkatkan kualitas atau taraf hidup masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Ghoniayah & Hartono, 2019a; Indonesian Bankers Association, 2015, p. 25).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki hubungan langsung dengan ekonomi sektor riil atau dapat kita sebut sebagai transaksi nyata, yakni dengan penyaluran pembiayaan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah (Ghoniayah & Wakhidah, 2012). Pembiayaan dengan akad tersebut dominan ditransaksikan oleh bank syariah dengan perusahaan sehingga mampu meningkatkan tingkat produksi serta kualitas produksi. Hal ini merupakan karakter penting yang dimiliki bank syariah (Goaied & Sassi, 2010).

2.2.2.1. Indikator Pembiayaan dan Kredit

Untuk mengetahui besarnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dapat dilihat pada Laporan Keuangan perbankan, lebih spesifik yaitu pada komponen aset bank syariah (Financial Ferivices Authority, 2018; Ghoniyah & Wakhidah, 2012). Penelitian ini menggunakan nilai total penyaluran kredit atau total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan dalam penyusunan analisis pengaruh (Ghoniyah & Setyowati, 2019; Riyadi & Yulianto, 2014).

2.2.2.2. Pembiayaan/Kredit dengan Profitabilitas

Keuntungan dari penyaluran pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bank syariah, baik dari pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, maupun sewa (Ghoniyah & Wakhidah, 2012). Dengan demikian jelas sudah bahwa besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan sangat berdampak pada besarnya pendapatan yang akan diperoleh bank syariah. (Agza & Darwanto, 2017; Al Karim & Alam, 2013; Almanaseer & AISlehat, 2016) membenarkan keterkaitan penyaluran dana bank akan berdampak pada pengembalian yang diperoleh bank.

Bank syariah perlu tetap memperhatikan bahwa penyaluran dana yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam akan tetapi juga memperhatikan penggunaan dana yang disalurkan, yakni memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan pembangunan di sektor riil. Hal ini menimbulkan hipotesis yang sedikit unik di mana artinya

penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil, akan memiliki dampak yang rendah bahkan cenderung negatif terhadap laba perusahaan. Sebagaimana hasil penelitian dari (Agza & Darwanto, 2017; Cahyani, 2016; Ghoniyah & Hartono, 2019a; Haq, 2015).

Presentasi kredit yang terancam macet akan mengancam terjadinya penurunan pendapatan bank. Di sisi lain bank memiliki kewajiban untuk memiliki kinerja yang baik sehingga dapat mempertahankan eksistensi perusahaan secara berkelanjutan, yakni dengan menghasilkan laba yang berkelanjutan (Ghoniyah & Aryani, 2018; Indonesian Bankers Association, 2015, p. 2). Dengan kata lain kualitas kredit bermasalah tidak hanya mengindikasikan kondisi yang tidak baik oleh masyarakat, yang diwakilkan oleh debitur, serta dapat mengancam keberlangsungan perusahaan.

Kontribusi perbankan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dapat ditunjukkan dengan tuntutan perusahaan terhadap profit yang rendah. Kesimpulan tersebut akan semakin valid ketika diketahui bahwa kualitas pembiayaan/kredit yang diberikan benar-benar dalam kondisi baik. Sementara apabila profit yang diperoleh perbankan rendah di saat NPF tinggi hal tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan sedang tidak cukup baik sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang besar untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Biyantoro & Ghoniyah, 2019; Ghoniyah & Hartono, 2019a, 2019b; Ghoniyah, Mutamimah, & Amilahaq, 2020).

2.2.2.3. Pembiayaan/Kredit dengan SDGs

Perbankan memiliki tujuan sosial yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan pola bisnis yang dimiliki, yaitu dengan menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Ghoniayah & Setyowati, 2019; Ghoniayah & Wakhidah, 2012; Muna & Ghoniayah, 2013). Sistem pembiayaan berbagi hasil yang dimiliki perbankan syariah memiliki skema yang menarik dan relevan untuk masyarakat terutama yang mengajukan pembiayaan untuk membuka usaha atau pengembangan usaha. Hal tersebut dikarenakan pada skema pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah juga harus memperhatikan kinerja usaha nasabah ketika hendak meminta keuntungan atas penyeteran modal oleh pihak syariah (Ghoniayah & Aryani, 2018; Ghoniayah & Hartono, 2019a, 2019b; Ghoniayah et al., 2020).

Mengetahui bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil adalah untuk membiayai usaha nasabah. Hal tersebut juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dikarenakan produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dengan adanya tambahan-tambahan modal tersebut (Ghoniayah & Hartono, 2019a).

Bank merupakan satu-satunya institusi yang diperkenankan menghimpun dana masyarakat dan memiliki peran sentral pertumbuhan ekonomi dalam fungsi intermediasinya. Hubungan antarbank sangatlah penting dan strategis karena kegagalan satu bank dapat berdampak terhadap ekonomi secara makro (Ghoniayah & Hartono, 2019b; Ghoniayah et al., 2020;

Indonesian Bankers Association, 2015, p. 25; Muna & Ghoniyah, 2013).

Demikian pula, (Ávila, 2003), keluar dengan hasil serupa dari studinya tentang lima belas ekonomi Uni Eropa, menggunakan teknik estimasi panel untuk menilai mekanisme di mana perubahan kebijakan telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara. (Habibullah & Eng, 2006) melakukan analisis pengujian kausalitas pada 13 negara berkembang Asia dan juga menemukan bahwa pinjaman bank meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Laporan Stabilitas Keuangan Global 2008 IMF juga menunjukkan dampak signifikan secara statistik dari pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan PDB (Oluitan, 2009 dalam (Mamman & Alhaji Hashim, 2013)).

Pengaruh pendanaan untuk produksi lebih efisien daripada alokasi menurut pinjaman murni. Karena pendanaan untuk produksi dapat berdampak pada pembangunan ekonomi (Goaied & Sassi, 2011). Dengan mengecualikan prinsip bunga dari mekanismenya, bank-bank Islam mengecualikan semua kegiatan spekulatif yang terkait dengan ekspektasi suku bunga. Perubahan aliran uang akan secara langsung mencerminkan pada lingkungan nyata dengan perubahan permintaan dan pasokan barang dan jasa. Bank Islam mengintegrasikan lingkup ekonomi riil dengan menggunakan suku-suku lain di mana waktu nilai uang dipertahankan seperti tingkat bagi hasil di *musyarakah*, tingkat markup di *mudharabah* dan tingkat sewa dalam leasing (Biyantoro & Ghoniyah, 2019; Ghoniyah & Hartono, 2019b; Ghoniyah & Wakhidah, 2012). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa peningkatan penyaluran dana oleh bank baik dalam bentuk

kredit maupun pembiayaan, dapat meningkatkan pembangunan negara (Abusharbeh, 2017; Al-abadallat, 2017; Alkhazaleh, 2017; Ghoniyah & Hartono, 2019a; Josephine, Oladele Akeeb O., & Makwe Emmanuel U, 2016).

2.2.3. Kualitas Pembiayaan dan Kualitas Kredit

Masyarakat yang memperoleh fasilitas pembiayaan atau kredit, dalam kondisi usaha yang berkembang yang bersangkutan akan dapat melaksanakan kewajiban terhadap pihak bank. Akan tetapi ketika kondisi keuangan maupun usaha nasabah pembiayaan/kreditur mengalami penurunan maka ketepatan waktu dan kemampuan mereka untuk menunaikan kewajiban terhadap perbankan akan berkurang. Fenomena inilah yang dapat menggambarkan kualitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan kepada masyarakat. Atau secara umum juga dapat disebut sebagai pembiayaan bermasalah (Indriana & Zuhroh, 2012).

Pembiayaan yang memiliki kualitas yang kurang baik akan meningkatkan presentasi pembiayaan yang terancam macet, hal tersebut juga akan mengancam terjadinya penurunan pendapatan bank syariah. Di sisi lain bank syariah memiliki kewajiban untuk memiliki kinerja yang baik untuk sehingga dapat mempertahankan eksistensi perusahaan secara berkelanjutan, yakni dengan menghasilkan laba yang berkelanjutan (Indonesian Bankers Association, 2015, p. 2). Dengan kata lain kualitas pembiayaan bermasalah tidak hanya mengindikasikan kondisi yang tidak baik oleh masyarakat, yang diwakilkan oleh debitur, serta dapat mengancam

keberlangsungan perusahaan (Ghonyah & Aryani, 2018; Ghonyah & Hartono, 2019b; Ghonyah et al., 2020).

Penyaluran pembiayaan tidak hanya bisnis untuk mencari keuntungan, akan tetapi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kemaslahatan umat. Sebagaimana tertuang dalam Al Qur'a surat Al Jumu'ah ayat 10 (Indonesian Bankers Association, 2015, p. 28);

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Filosofi dasar tersebut menjadikan proses penyaluran pembiayaan oleh bank syariah harus lebih hati-hati karena harus memperhatikan unsur moral, etika, dan spiritual, selain pertimbangan dasar yang harus diperhatikan oleh perbankan seperti risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas (Indonesian Bankers Association, 2015, p. 28).

Kualitas pembiayaan yang baik ditentukan oleh pemahaman dan pengelolaan yang baik oleh pegawai dan pejabat yang menangani pembiayaan tersebut, yang mencakup, antara lain tentang tujuan dan prosedur pembiayaan, perencanaan, dan strategi pembiayaan, pengelolaan, dan pemantauan pembiayaan, serta pengawasan pembiayaan. Karena itu, bisnis pembiayaan perbankan harus diorganisasikan sedemikian rupa, sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan *best practices* yang telah diterapkan secara internasional dan terbukti keandalannya (Biyantoro & Ghonyah, 2019; Ghonyah & Hartono, 2013, 2019b; Indonesian Bankers Association, 2015, p. 3).

2.2.3.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan salah satunya dapat dinilai dari besarnya *non performing financing ratio* (NPF). Rasio tersebut menunjukkan tingkat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada perbankan, serta dapat menunjukkan adanya kemungkinan ketidakmampuan manajemen dalam mengelolan pembiayaan yang disalurkan, maupun kegagalan manajemen untuk menyeleksi nasabah-nasabah yang benar-benar dapat diberikan amanah berupa pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah semakin besar. Hal ini memperbesar kemungkinan kondisi keuangan bank sedang bermasalah (Pratiwi, 2012).

2.2.3.2. Indikator Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah pada umumnya diukur menggunakan rasio *non performing financing* (NPF), yakni perbandingan antara pembiayaan bermasalah dibanding dengan total pembiayaan yang disalurkan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan kualitas pembiayaan, apabila nilai rasio semakin tinggi maka dapat dikatakan bahwa kualitas pembiayaan memburuk (Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/24/DPbS tahun 2007). Pada bank konvensional kualitas pembiayaan disebut dengan *non performing loan* (NPL). Adapun NPF atau NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL/NPF} = \frac{\text{Pembiayaan/Kredit bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan/Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007, (Ferdyant et al., 2014; Purboastuti, Anwar, & Suryahani, 2015)

2.2.3.3. Kualitas Pembiayaan dengan Profitabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas pembiayaan yang direfleksikan dengan rasio pembiayaan atau kredit bermasalah dapat dinilai bahwa dengan NPF yang tinggi maka perusahaan akan terancam memiliki laba yang rendah karena kegagalan perbankan dalam menyalurkan dana dengan tepat kepada masyarakat (Ferdyant et al., 2014). Di sisi lain profit perbankan yang rendah menunjukkan itikad baik perbankan dalam menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu visi mereka (Murerwa, 2015). Dengan dua pemaknaan atas profit rendah perbankan yang saling berlawanan, maka kualitas pembiayaan perbankan perlu dilibatkan dalam pengukuran kontribusi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ghonyiah & Hartono, 2019a).

Laba perbankan yang rendah disertai evaluasi kualitas pembiayaan yang baik (rasio rendah atau kecil), menunjukkan bahwa perbankan benar-benar memiliki kontribusi yang baik untuk tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia khususnya di sektor ekonomi (pertumbuhan ekonomi).

2.3. Sustainable Development Goals

Sustainable development goals (SDGs) atau dalam Bahasa Indonesia disebut tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan program kelanjutan dari *millennium development goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusun agenda internasional ini dengan melibatkan 194 negara, berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia, serta *civil society*. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan panduan pengambilan kebijakan serta pendanaan program selama hingga tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial (Financial Ferivices Authority, 2017).

Pembentukan SDGs juga harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Adapun 17 tujuan dalam agenda SDGs ialah sebagai berikut.

Tujuan 1: Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.

Tujuan 2: Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

- Tujuan 3:** Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
- Tujuan 4:** Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- Tujuan 5:** Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
- Tujuan 6:** Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- Tujuan 7:** Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energy yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- Tujuan 8:** Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Memproosikan pertumbuhan ekonom berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
- Tujuan 9:** Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
- Tujuan 10:** Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- Tujuan 11:** Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

- Tujuan 12:** Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13:** Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14:** Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- Tujuan 15:** Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- Tujuan 16:** Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- Tujuan 17:** Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonom dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar untuk semua. Selain itu, pertumbuhan yang cepat dapat membantu mengurangi kesenjangan upah sehingga dapat mengurangi

kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin (Central Bureau of Statistics, 2016, p. 139).

2.3.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial (Financial Ferivices Authority, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonom dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar untuk semua. Selain itu, pertumbuhan yang cepat dapat membantu mengurangi kesenjangan upah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin (Central Bureau of Statistics, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan SSDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain (i) melakukan pemetaan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan

pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia (Central Bureau of Statistics, 2016, p. 3).

Dalam implementasinya, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah *universality*, yakni semua negara maju maupun berkembang harus bersama-sama mendorong penerapan SDGs. Dalam konteks nasional, implementasi SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*. Prinsip ini mengandung makna bahwa SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan

penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah “*No One Left Behind*” yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan SDGs di Indonesia.

2.3.2. Indikator SDGs

PBB menetapkan beberapa standar kesuksesan tercapainya SDGs, untuk pilar ekonomi indikator kesuksesan *sustainable development* tersebut diantaranya adalah tingkat pengangguran, upah rata-rata, proporsi lapangan kerja, koefisien gini, pembangunan infrastruktur, serta GDP (Central Bureau of Statistics, 2016, p. 122; Clayton, Pinnock, & Ajagunna, 2014, pp. 191–192; Nugroho, 2017; Paul & Uhomobhi, 2012, p. 215; Raimi & Ogunjirin, 2012; Wang et al., 2019, p. 29).

Pada proksi pertumbuhan ekonomi, BPS memberikan contoh dengan menggunakan tingkat pertumbuhan *gross domestic product* (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) per kapita, dan PDB per kapita dalam satuan rupiah. (Central Bureau of Statistics, 2016) memberikan ilustrasi pertumbuhan PDB per kapita untuk negara kurang berkembang setidaknya adalah 7%. Hal ini pun didukung oleh penelitian sebelumnya tentang *sustainable development* yang menjadikan GDP sebagai indikator utama (Clayton et al., 2014, pp. 191–192; Ghoniyah & Hartono, 2019a; Nugroho, 2017; Paul & Uhomobhi, 2012, p. 215; Raimi & Ogunjirin, 2012; Wang et al., 2019, p. 29).

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar untuk semua. Selain itu, pertumbuhan yang cepat dapat membantu mengurangi kesenjangan upah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin (Central Bureau of Statistics, 2016, p. 139).

Secara lebih komprehensif, *sustainable development* dapat diukur dengan memperhatikan ketiga pilar sekaligus (ekonomi, lingkungan, dan sosial) (Central Bureau of Statistics, 2016; Financial Services Authority, 2017; Janusz, 2016; Mohammadi, Emadzadeh, & Ansari, 2012; Stanny & Czarnecki, 2010).

Pada hasil pemetaan ketersediaan indikator SDGs di Indonesia diperoleh sebanyak 85 indikator nasional yang telah sesuai dengan indikator global, sementara sebanyak 71 indikator global akan diukur dengan indikator proksi. Sisanya sebanyak 85 indikator global belum tersedia datanya dan harus dikembangkan di masa mendatang. Informasi ini menunjukkan bahwa dari sebanyak 241 indikator SDGs, hanya sekitar sepertiga dari total indikator global tersebut yang bisa digunakan oleh Indonesia untuk keterbandingan internasional dalam memonitor perkembangan capaian SDGs (Central Bureau of Statistics, 2016). Selanjutnya jika dilihat menurut

pilar, kesesuaian antara indikator nasional dan indikator global untuk pilar ekonomi sebanyak 24 indikator.

Beberapa indikator pilar sosial yang telah dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Indonesia diantaranya ialah laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, angka melek huruf di usia 15 tahun ke atas, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, tingkat penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini. Adapun indikator untuk pilar ekonomi diantaranya adalah produk domestik bruto, tingkat inflasi, total ekspor, total impor, jumlah wisatawan asing, jumlah uang beredar luas, cadangan devisa negara, tingkat investasi lokal, investasi dari luar negeri, kurs mata uang, dan IHSG (indeks harga saham gabungan). Sementara pilar lingkungan masih sangat sedikit, yaitu luas kegiatan yang sudah direboisasi, produksi minyak bumi mentah dan kondensat, dan produksi gas alam (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pada studi ini, indikator yang digunakan ialah indikator yang masih memiliki keterkaitan dengan proses bisnis perbankan. Seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia untuk pilar sosial, dan produk domestik bruto, wisatawan asing, inflasi, investasi lokal untuk pilar ekonomi.

2.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Sustainable Development Goals*

Teori pertumbuhan ekonomi meyakini institusi keuangan khususnya bank dianggap sebagai instrumen yang berguna

untuk meningkatkan kapasitas produktif ekonomi dan sumber dana internal yang penting untuk negara manapun (Schumpeter (1991) dalam (Abusharbeh, 2017)). Adapun beberapa peneliti telah membuktikan bahwa industri perbankan mampu memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Adekola, 2016; Alkhazaleh, 2017; Klein & Weill, 2018), yakni dengan menganalisis hubungan laba bank terhadap *gross domestik product*, serta dengan menganalisis hubungan penyaluran kredit atau pembiayaan terhadap GDP (Abusharbeh, 2017; Al-Abedallat, 2017; Alkhazaleh, 2017; Josephine et al., 2016; Tabash & Suhaib Anagreh, 2017).

Negara berkembang umumnya memiliki permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, standar hidup yang rendah, dan inflasi. Maka dengan itu negara selalu berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dalam upaya meningkatkan standar hidup (Abusharbeh, 2017). Beberapa faktor yang dapat menjadi stimulan dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan ialah seperti energi terbarukan (ramah lingkungan)/ecoenergy, digitalisasi (ICT) (Arreymbi & A. Agbor, 2009; Paul & Uhomobhi, 2012), infrastruktur (Fosu, 2019), value added growth, dan domestic investment growth (Asheghian, 2016).

Sistem perbankan menjadi penting untuk pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan mengumpulkan dana, menyalurkan pinjaman/pembiayaan untuk mendorong investasi dan produksi, menciptakan ekspansi ekonomi ke sektor-sektor seperti agrikultur, industri, dan perdagangan, serta menjadi perantara

antara penabung dengan pemincam. Dengan kata lain industri perbankan berkontribusi dalam pembentukan modal awal untuk proyek investasi (Abusharbeh, 2017).

Adapun beberapa peneliti yang membuktikan bahwa industri perbankan mampu memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi ialah (Adekola, 2016; Al-abadallat, 2017; Klein & Weill, 2018) dengan menganalisis hubungan laba bank terhadap *gross domestik product*, serta oleh (Abusharbeh, 2017; Al-abadallat, 2017; Alkhazaleh, 2017; Josephine et al., 2016; Tabash & Suhaib Anagreh, 2017) dengan menganalisis hubungan penyaluran kredit atau pembiayaan terhadap GDP.

2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk studi pembangunan jangka panjang yang tidak berfokus pada fluktuasi dalam pekerjaan, melibatkan aspek tenaga kerja serta kemajuan teknologi (Eriksson, 1996). Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkaitan dengan peningkatan berkelanjutan dalam per kapita atau per produk pekerja, sering disertai dengan peningkatan populasi dan biasanya dengan perubahan struktural (Simon Kuznets (1966) dalam (Acemoglu, 2009, p. 695).

Para ahli mengemukakan beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang mana membahas tentang bagaimana terjadinya pertumbuhan ekonomi serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Beberapa teori tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa aliran; aliran ekonomi klasik, aliran ekonomi historis, aliran ekonomi sosialis, aliran ekonomi pasca Keynes, dan aliran ekonomi neo klasik (Chalid, 2010).

Aliran teori pasca Keynes (1936) dalam (Chalid, 2010) dikemukakan berdasarkan hasil observasi adanya ancaman kekurangan lapangan pekerjaan, serta adanya potensi kebijakan moneter dan fiskal oleh pemerintah yang mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat produksi dan lapangan pekerjaan terjaga. Harrod dan Domar (aliran neo klasik) melengkapi teori tersebut dengan menambahkan unsur tabungan dan investasi sebagai hal yang harus dimiliki untuk dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi (Chalid, 2010).

2.4.1. Teori Supply-Leading Finance Policy

Teori keuangan *supply-leading* muncul di era pasca-Perang Dunia II akhir 1940-an dan 1950-an. Teori ini berasal dari kombinasi tiga gagasan: bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perkembangan ekonomi yang sangat penting, yaitu teknologi pertanian, sementara sebagian besar petani tidak mampu membiayai proses produksi termasuk membeli teknologi baru. Maka dengan itu, program kredit pedesaan bersubsidi dibentuk secara masif di banyak negara berkembang. Petani miskin akan menerima kredit lunak dan akan memberikan hasil yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan mereka (Robinson, 2001, p. 138). Pendekatan ini, diperluas ke peminjam nonpertanian (Robinson, 2001, p. 141).

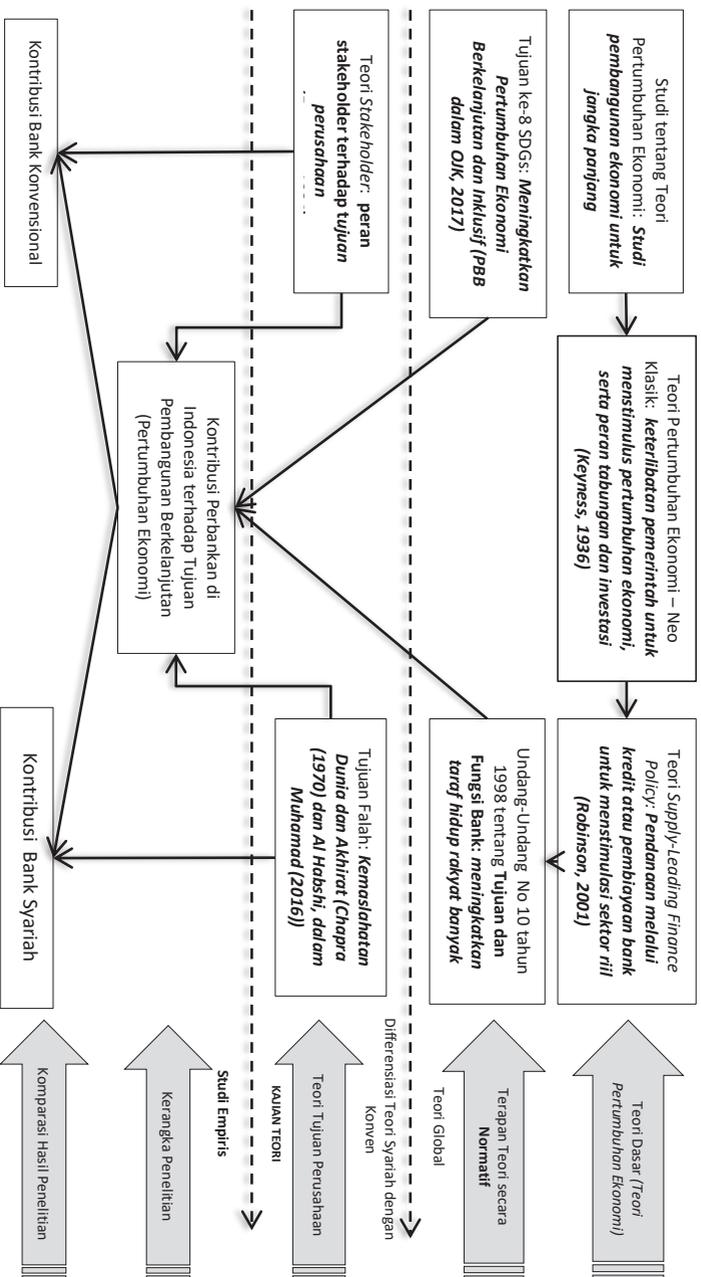
Supply-leading finance tidak dapat dikatakan sebagai prasyarat untuk memulai pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mandiri, akan tetapi memberikan kesempatan untuk mendorong pertumbuhan riil dengan cara stimulasi keuangan. Dengan demikian sektor keuangan cenderung memainkan peran yang

lebih signifikan di awal proses pertumbuhan daripada di kemudian waktu. Dengan kata lain sektor keuangan memiliki peran katalis (mempercepat) dalam mendorong pengembangan perkembangan sektor-sektor penghasil barang/produksi (Patrick (1966) dalam (Desai & Mellor, 1993, p. 8).

2.5. Roadmap Kajian Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka yang didominasi oleh teori-teori dasar tersebut, untuk lebih mudah memahami maka disusunlah *roadmap* penelitian sebagai berikut.

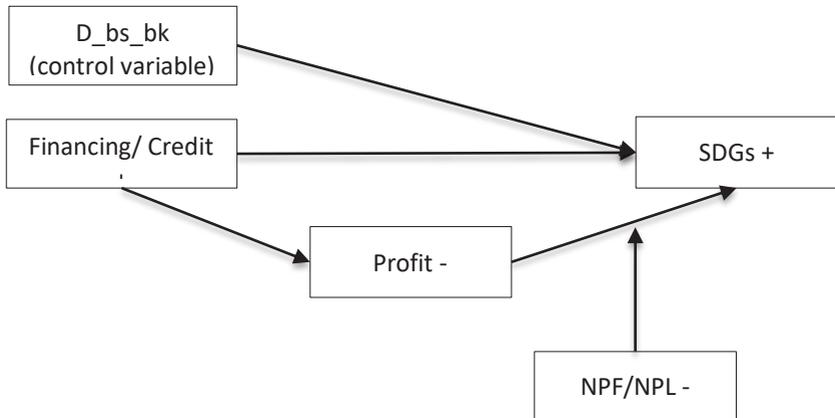
Gambar 1. Roadmap Kajian Teoritis



2.6. Kerangka Pemikiran

Telaah literatur-literatur terdahulu tersebut menjadi dasar disusunnya kerangka pemikiran yakni sebagai berikut.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Sumber: berbagai sumber.

BAB III

STUDI PENGUJIAN KONSEP TUJUAN MASLAHAH SOSIAL EKONOMI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

3.1. Gambaran Umum Perbankan

Studi analisis menggunakan data populasi bank di Indonesia selama periode 2011 hingga 2018, dengan ketentuan ialah bank yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian. Dari 107 bank konvensional dan 13 bank syariah di Indonesia, hanya 88 bank konvensional dan 13 bank syariah yang dapat diakses *annual reportnya* (Financial Services Authority, 2018). Data bersifat *unbalanced panel* karena beberapa bank di tahun 2011 dan 2012 belum berdiri, atau di tahun 2018 telah *merger* dengan bank lainnya. Sehingga total data penelitian sebanyak 801, terdiri dari 98 annual report bank syariah dan 703 annual report bank konvensional.

Tabel 3.1. Gambaran Umum Perbankan di Indonesia

Kategori	Statistik Deskriptif	Kredit atau Pembiayaan	ROA	NPF atau NPL
Semua Bank	<i>Mean</i>	37,936,134,107,516.1	0.0160	0.0270
	<i>Max</i>	843,598,000,000,000.0	0.1240	0.4399
	<i>Min</i>	34,328,000,000.0	- 0.2013	0.00
	<i>median</i>	8,179,754,000,000.0	0.0173	0.0216
	<i>std dev</i>	96,423,701,622,945.4	0.0225	0.0326
Bank Syariah	<i>Mean</i>	12,249,279,484,907.5	0.0079	0.0427
	<i>Max</i>	67,753,000,000,000.0	0.1240	0.4399
	<i>Min</i>	72,237,000,000.0	- 0.2013	0.00
	<i>median</i>	4,789,629,609,500.0	0.0091	0.0297
	<i>std dev</i>	15,936,002,090,043.0	0.0376	0.0614
Bank Konvensional	<i>Mean</i>	41,516,947,411,948.1	0.0171	0.0248
	<i>Max</i>	843,598,000,000,000.0	0.0744	0.4100
	<i>Min</i>	34,328,000,000.0	- 0.1115	0.00
	<i>median</i>	8,966,000,000,000.0	0.0186	0.0207
	<i>std dev</i>	102,251,816,104,818.0	0.0192	0.0255

Sumber: Annual Report perbankan periode 2011 hingga 2018 (2020)

Kapitalisasi pasar yang didominasi oleh bank konvensional tidak hanya dapat dilihat dari jumlah perbankan saja, akan tetapi juga dapat dilihat dari nilai maksimum penyaluran kredit yang jauh lebih tinggi dibanding nilai maksimum penyaluran pembiayaan oleh bank syariah (tersaji dalam Tabel 3.1.). Adapun ketika total kredit dan total pembiayaan digabungkan dan diambil rata-ratanya, menunjukkan bahwa rata-rata kredit oleh bank konvensional lebih tinggi dibanding rata-rata total kredit dan pembiayaan. Hal tersebut menandakan bahwa kapitalisasi pasar dan kontribusi penyaluran dana segar kepada masyarakat luas oleh bank syariah masih sangat rendah dan belum mampu menjadi stimulan dalam kinerja perbankan secara keseluruhan.

Hal yang sama juga terjadi pada kualitas pembiayaan perbankan, di mana rata-rata kualitas kredit bank konvensional lebih tinggi dibandingkan rata-rata kualitas kredit/pembiayaan ketika bank syariah ikut dihitung (rata-rata total kualitas kredit/pembiayaan). Dengan kata lain rasio NPL bank konvensional lebih rendah dibanding rasio NPL bank konvensional dan bank syariah.

Berdasarkan data perbankan secara umum tersebut, maka bukan tidak mungkin jika kontribusi bank syariah tidak dapat memberikan peran yang cukup signifikan, dikarenakan jumlah bank yang masih sangat sedikit, serta *market share* yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan *market share* bank konvensional.

3.2. Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Penelitian ini menggunakan faktor eksternal perusahaan sebagai variabel akhir, yakni tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada penelitian ini mengambil indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan secara langsung dengan kebijakan ekonomi negara (perbankan). Berikut adalah gambaran umum indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang direpresentasikan dalam bentuk statistik deskriptif.

Tabel 3.2. Gambaran Umum Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator SDGs	Satuan	Mean	Maximum	Minimum	Median	Std. Deviation
S_unemployment	Persen	5.93	6.60	5.30	6.00	0.43
S_poverty	Juta orang	28.23	30.00	25.90	28.30	1.18
S_IPM	Persen	69.25	71.40	67.10	69.25	1.52
E_gdp growth	Persen	5.38	6.20	4.90	5.15	0.49
E_tourist	Juta orang	10.66	15.80	7.60	9.80	2.93
E_Inflation	Persen	4.75	8.40	3.00	3.70	2.29
E_Local Investment	Miliar rupiah	179.9	328.6	76.0	167.8	86.2

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pilar lingkungan direpresentasikan dari jumlah pengangguran (*s_unemployment*), jumlah penduduk miskin (*s_poverty*), dan indeks pembangunan manusia (*s_IPM*). Sementara pilar ekonomi direpresentasikan dari angka pertumbuhan gdp (*e_gdp growth*), jumlah turis asing (*e_tourist*), tingkat inflasi (*e_inflation*), dan tingkat investasi lokal atau investasi dalam negeri (*e_local investment*). Ketujuh indikator tersebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik terkait indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018).

3.3. Analisis Data

3.3.1. Model Fit Analisis Kuantitatif

Pengujian fit model menggunakan WrapPLS 5.0 dengan cara melihat output *Model fit and quality indicate*, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. Sesuai dengan Tabel 3.3. tersebut terlihat bahwa model penelitian telah memenuhi semua kriteria model fit, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis model penelitian ini telah fit untuk meramalkan fenomena lapangan.

Tabel 3.3. General Output, Model Fit Indices and P values

Average path coefficient (APC)=0.145, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.082, P=0.005
Average adjusted R-squared (AARS)=0.078, P=0.007
Average block VIF (AVIF)=1.227, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.719, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.281, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=0.714, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=0.955, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=0.714, acceptable if ≥ 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7

Sumber: Output WarpPLS 5.0, 2020

Evaluasi apakah model fit (sesuai atau didukung) oleh data melihat pada output APC, ARS, dan AFIV. Nilai p untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indicator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5. Hasil output menunjukkan kriteria *goodness of fit* model telah terpenuhi yaitu dengan nilai p APC sebesar 0.001

dan ARS 0.007 serta signifikan. Nilai AVIF sebesar 1.719 juga telah memenuhi kriteria.

3.3.2. Model Pengukuran (*Outer Model*) Analisa Kuantitatif

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini bersifat formatif sehingga untuk melakukan pengujian model pengukurannya harus memenuhi 2 syarat. Persyaratan pertama adalah bobot indikator (*indicator weight*) harus signifikan secara statistic ($p < 0.05$). Persyaratan kedua adalah mengenai multikolinearitas, nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari 3.3 (Kock, 2013). Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka pengukuran konstruk formatif telah dinilai layak.

Tabel 3.4. Indicator Weights

<i>Indicators</i>	<i>Type of Indikator</i>	<i>SE</i>	<i>P value</i>	<i>WLS</i>	<i>ES</i>
Profits (ROA)	Formatif	0.032	<0.001	1	1.000
Credit/Loans	Formatif	0.032	<0.001	1	1.000
dummy_sharia	Formatif	0.032	<0.001	1	1.000
NPF	Formatif	0.032	<0.001	1	1.000
S_unemployment	Formatif	0.035	<0.001	1	0.167
S_poverty	Formatif	0.035	<0.001	1	0.155
E_gdp growth	Formatif	0.035	<0.001	1	0.101
E_tourist population	Formatif	0.035	<0.001	1	0.179
E_inflation	Formatif	0.035	0.023	1	0.026
S_IPM	Formatif	0.035	<0.001	1	0.186
E_Local investment	Formatif	0.035	<0.001	1	0.186
d_sharia*Profits	Reflective	0.032	<0.001	1	1.000
NPF*Profits	Reflective	0.032	<0.001	1	1.000

Sumber: Output WarpPLS 5.0, 2020

Tabel 3.5. Full collinearity VIFs

Profits	Credits	d_sharia	NPF/NPL	SDGs	d_sharia *Profits	NPF/NPL *Profits
1.710	1.147	1.067	2.254	1.112	1.882	2.860

Sumber: Output WarpPLS 5.0, 2020

Nilai signifikansi (*p-value*) seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian dari hasil output WarpPLS 5.0 terlihat pada Tabel 3.4. Sementara nilai *full collinearity VIF* masing-masing variabel pada model penelitian ini tersaji dalam Tabel 3.5.

Model pengukuran atau *outer model* menggambarkan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Berdasarkan output Indicator Weight yang tersaji pada Tabel 3.4., diketahui bahwa p value kurang dari 0.05. Serta output Full Collinearity VIFs yang tersaji pada Tabel 3.5. menunjukkan nilai VIFs yang tidak melebihi 3.3. dengan demikian model pengukuran dapat diterima.

3.3.3. Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang dibangun berdasarkan pada substansi teori. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk independen, dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Nilai *R-Square* masing-masing variabel endogen pada model penelitian ini tersaji dalam Tabel 4.6.

Tabel 3.6. Latent Variable Coefficient

	Profits	Credits	d_sharia	NPF/NPL	SDGs	d_sharia	NPF/NPL
						*Profits	*Profits
R-Squared	0.071				0.093		
Adj. R-Squared	0.068				0.087		
Composite Reliability	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000
Cronbach's Alpha	1.000	1.000	1.000	1.000	-14.216	1.000	1.000
Avg. Var. Extrac.	1.000	1.000	1.000	1.000	0.757	1.000	1.000
Full Collinearity VIF	1.710	1.147	1.067	2.254	1.112	1.882	2.860
Q-Squared	0.072				0.098		
Min	-9.678	-0.393	-0.373	-0.829	-1.529	-15.931	-21.894
Max	4.810	8.355	2.677	12.675	1.712	8.043	0.838
Median	0.058	-0.309	-0.373	-0.166	0.013	0.041	0.112
Mode	0.445	-0.393	-0.373	-0.829	-0.667	-0.019	0.076
Skewness	-2.358	0.144	2.305	6.721	0.188	-6.157	-17.200
Exc. Kurtosis	16.861	0.126	3.313	69.516	-0.983	107.733	337.542

Sumber: Output WarpPLS 5.0, 2020

3.4. Implikasi Perbankan Syariah pada SDGs

Nilai *R-Square* yang kecil menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pada Tabel 3.6., dapat terlihat bahwa kontribusi total penyaluran pembiayaan atau kredit terhadap laba perbankan sebesar 6.8%, sementara 93.2% lainnya dipengaruhi oleh kebijakan yang lainnya.

Sementara itu, total pembiayaan, serta laba yang dihasilkan oleh bank, mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan tujuan pembangunan berkelanjutan sebesar 8.7%. Adapun 92.3% lainnya dipengaruhi oleh faktor selain perbankan. Hal tersebut cukup wajar melihat tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu penilaian nasional dan komprehensif untuk mencerminkan kondisi Indonesia, dan pencapaian kondisi negara yang baik tersebut tidak bisa hanya dari peran perbankan saja, akan tetapi juga atas peran berbagai unsur maupun kebijakan lintas bidang dan sektor.

Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan variabel yang menggunakan indikator nasional, sementara variabel eksogen dari salah satu institusi yang ada di Indonesia yaitu perbankan. Sehingga dapat dipahami secara umum bahwa perbankan tidak akan dapat memberikan angka koefisien determinasi yang tinggi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena penilaian nasional memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Meski

demikian, signifikannya hubungan perbankan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan semakin menguatkan peran perbankan untuk negara.

3.4.1. Dampak Spesifik Perbankan Syariah pada SDGs

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t untuk mengetahui kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian lainnya ialah uji Model yang mana menggunakan uji F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama untuk mempengaruhi variabel dependen.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat pada p value path coefficients. Koefisien regresi tiap variabel terhadap variabel endogen disajikan pada Tabel 3.7., sementara signifikansi pengaruh dapat dilihat pada p value yang tersaji pada Tabel 3.8.

Tabel 3.7. Path coefficients

	Profits	Credits	d_sharia	NPF/NPL	SDGs	d_sharia *Profits	NPF/NPL *Profits
Profits		0.230	-0.111				
Credits							
d_sharia							
NPF/NPL							
SDGs							
d_sharia *Credits							0.083
d_sharia *Profits							-0.066
NPF/NPL*Profits							

Sumber: output WarpPLS 5.0., 2020

Tabel 3.8. P Values

	Profits	Credits	d_sharia	NPF/NPL	SDGs	d_sharia *Profits	NPF/NPL *Profits
Profits		<0.001	<0.001				
Credits							
d_sharia							
NPF/NPL							
SDGs							
d_sharia *Credits							0.009
d_sharia *Profits							0.030
NPF/NPL*Profits							

Sumber: output WarpPLS 5.0., 2020

Tabel 3.9. Standard Error

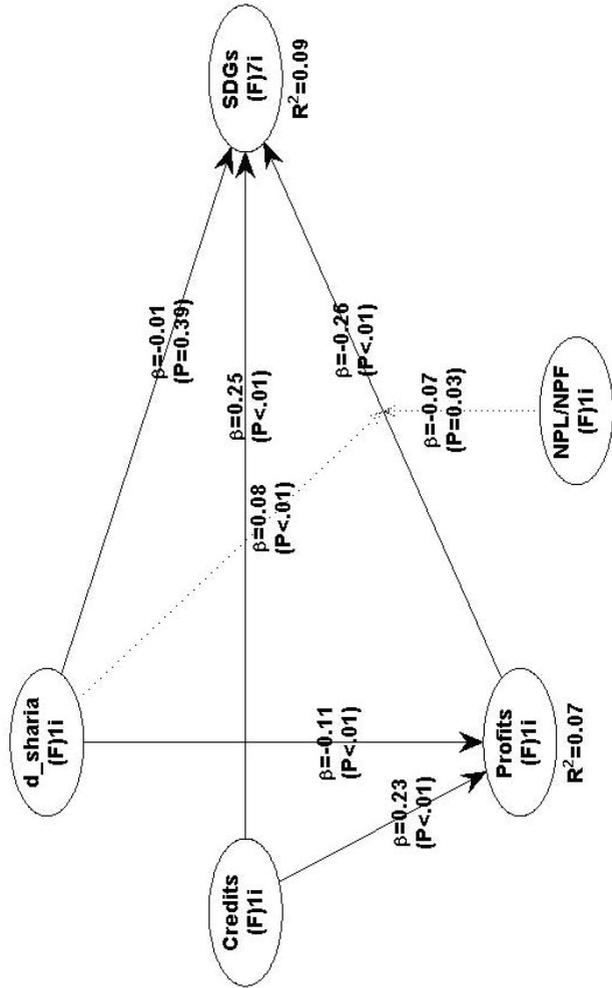
	Profits	Credits	d_sharia	NPF/NPL	SDGs	d_sharia *Profits	NPF/NPL *Profits
Profits	0.035						
Credits		0.035					
d_sharia			0.035				
NPF/NPL				0.035			
SDGs	0.034	0.034	0.035			0.035	0.035
d_sharia *Credits							
d_sharia *Profits							
NPF/NPL*Profits							

Sumber: output WarpPLS 5.0., 2020

Berdasarkan Tabel path coefficient dan p value, dapat diketahui bahwa hubungan yang tidak signifikan ialah dummy syariah terhadap SDGs. Akan tetapi dummy syariah menjadi moderasi yang baik antara laba bank terhadap SDGs. Dengan kata lain ada perbedaan kontribusi pembentukan laba perbankan syariah dengan konvensional, dalam upaya mencapai SDGs.

Secara komprehensif, hasil inner model tidak hanya dapat dilihat dari path coefficient yang tersaji pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8, akan tetapi dapat dengan melihat gambar yang dihasilkan.

Gambar 3. Model Hasil Penelitian



Sumber: output WarpPLS 5.0., 2020

Pada model penelitian ini terdapat model analisis path (analisis jalur) antara pembiayaan, profitabilitas bank syariah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Atas dasar tersebut maka perlu dilakukan uji pengaruh tidak langsung dengan profitabilitas bank sebagai variabel intervening. Adapun uji yang dimaksud ialah uji Sobel (Sobel Test). Pengujian hubungan tidak langsung disajikan pada Tabel 3.10.

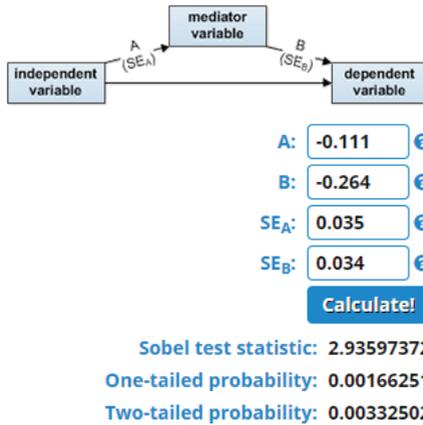
Tabel 3.10. *Indirect Effect*

Indirect Effects	Coefficient	P value	Standard Errors
d_Sharia → Profits → SDGs	0.029	0.120	0.025
Credit → Profits → SDGs	-0.061	0.007	0.025

Sumber: output WarpPLS 5.0., 2020

Pengujian hubungan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan melakukan sobel test. Hasil sobel test disajikan pada Gambar 4. dan Gambar 5.

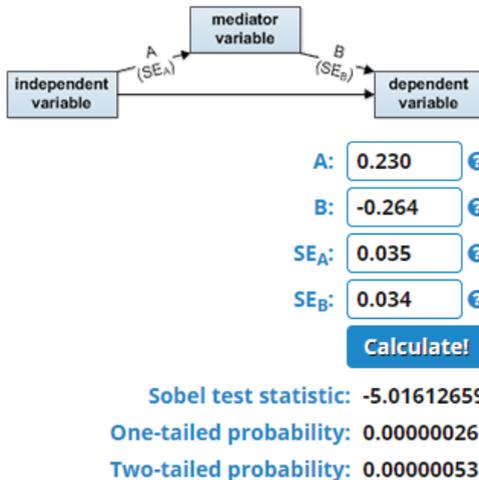
Gambar 4. Hasil Sobel Test $d_shariah \rightarrow Profits \rightarrow SDGs$



Sumber: output uji sobel, diolah dengan

<https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31>, (2020)

Gambar 5. Hasil Sobel Test Credits $\rightarrow Profits \rightarrow SDGs$



Sumber: output uji sobel, diolah dengan

<https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31>, (2020)

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa t statistik lebih dari $\pm 1,69$, dan nilai probabilitas lebih rendah dari 1% ($p < 0,01$). Dengan demikian, terbukti kuat bahwa pembiayaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap SDGs, yakni melalui laba perbankan.

Dummy syariah juga dapat mempengaruhi SDGs melalui laba perbankan. Hal tersebut menandakan bahwa perbedaan kontribusi antara bank syariah dengan bank konvensional dalam upaya meningkatkan SDGs, adalah melalui laba bank.

BAB IV

PERAN STRATEGIS PERBANKAN SYARIAH

4.1. Perbedaan kontribusi Bank Syariah terhadap SDGs dengan dampak Bank Konvensional terhadap SDGs

Hipotesis awal menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dengan melihat hasil variabel dummy yang mengarah pada variabel laten tujuan pembangunan berkelanjutan. Dummy tersebut menjelaskan dengan angka satu apabila bank merupakan bank syariah, dan 0 apabila bank konvensional, dimana pada penelitian ini menggunakan kode *d_sharia*.

Pada pengujian ini, dapat dengan melihat 3 hubungan, yaitu hubungan antara *d_sharia* terhadap SDGs secara langsung, antara *d_sharia* terhadap SDGs melalui laba bank (intervening), serta peran *d_sharia* dalam memoderasi laba bank terhadap SDGs. Pada hubungan pertama, tidak dapat dibuktikan adanya perbedaan signifikan kontribusi bank syariah dan bank konvensional terhadap SDGs. Akan tetapi perbedaan kontribusi tersebut melalui laba terhadap SDGs. *D_sharia* mampu memoderasi laba terhadap SDGs dengan tingkat signifikansi 0.001. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan kontribusi bank syariah terhadap SDGs, dengan kontribusi bank konvensional terhadap SDGs.

Hasil studi ini pun membuktikan bahwa secara umum, baik bank konvensional dan bank syariah telah memiliki orientasi untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu laba yang dituntut tidak terlalu besar (laba yang kecil meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan negara). Adapun perbedaan kontribusi antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada dampak atas laba yang diminta perbankan. ...Tuntutan laba yang terlalu tinggi oleh perbankan cenderung akan menurunkan tingkat pembangunan berkelanjutan negara (koefisien -0.26). Akan tetapi pada bank syariah, peningkatan laba hanya akan menurunkan 0.16 poin tingkat pembangunan berkelanjutan negara (koefisien Laba bank -0.026 ditambah 0.08 koefisien dummy syariah).

Studi ini membuktikan permintaan laba perusahaan yang terlampau tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut berlaku untuk semua jenis perbankan di Indonesia. Akan tetapi perbankan yang menggunakan prinsip syariah memiliki dampak yang lebih kecil dibanding bank konvensional. Hal tersebut dikarenakan kapitalisasi pasar perbankan syariah jauh lebih kecil dibanding perbankan konvensional. Market share bank syariah di Indonesia yang masih di bawah 10%. Jumlah perbankan di mana bank syariah baru muncul di Indonesia di tahun 1992 baru sebanyak 13 Bank Umum Syariah, sementara bank konvensional yang telah jauh lebih lama berdiri memiliki lebih dari 120 bank.

Dari perspektif yang lain, hubungan laba bank syariah yang negatif terhadap SDGs, menunjukkan bahwa bank syariah pun memiliki orientasi untuk mencapai tujuan bersama. Akan tetapi perbankan syariah masih memiliki kecenderungan lebih tinggi

untuk berorientasi terhadap laba dibanding bank konvensional. Berdasarkan perspektif bisnis, hal tersebut karena bank-bank syariah di Indonesia masih dalam tahap berkembang sehingga membutuhkan lebih banyak dana untuk dapat mengejar ketertinggalannya dibanding penguasa pasar keuangan di Indonesia, yakni bank konvensional. Ini dikuatkan dengan hubungan kuat antara dummy syariah terhadap laba bank. Di mana bank syariah cenderung menghasilkan laba yang lebih rendah dibanding bank konvensional ($d_sharia \rightarrow \text{profit}$, Tabel 3.7). Itu artinya perbankan syariah masih dalam tahap untuk menstabilkan kondisi perusahaan, agar mencapai kondisi bisnis yang dapat hidup berkelanjutan (*business sustainability*) (Ghonyah & Aryani, 2018).

4.2. Pengaruh Pembiayaan atau Kredit terhadap SDGs

Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan atau kredit dapat mempengaruhi laba perbankan itu sendiri (credits berpengaruh terhadap profits pada tingkat signifikansi $p < 0.001$). Hubungan searah antara penyaluran kredit atau pembiayaan terhadap peningkatan laba merupakan hal yang sepatutnya terjadi. Karena bagaimanapun juga sumber pendapatan utama bank ialah dari return atas penyaluran pembiayaan atau kredit yang mereka berikan kepada masyarakat (Firdaus & Ariyanti, 2009). Temuan ini sejalan dengan bukti empiris peneliti sebelumnya (Agza & Darwanto, 2017; Almanaseer & AlSlehat, 2016; Cahyani, 2016; Haq, 2015; Jaurino & Wulandari, 2017), di mana peningkatan penyaluran kredit dapat meningkatkan tingkat profitabilitas bank.

Hipotesis awal menjelaskan bahwa total kredit atau total pembiayaan dapat meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan melihat dampak Credits terhadap SDGs secara langsung. Berdasarkan Gambar 4.2., diketahui bahwa dampak penyaluran pembiayaan atau kredit signifikan pada alfa 1% ($p < 0,01$).

Secara ilmiah, temuan penelitian ini juga mendukung (Abusharbeh, 2017; Al-abadallat, 2017; Alkhazaleh, 2017; Josephine et al., 2016), di mana semua peneliti tersebut sepakat bahwa penyaluran pembiayaan ataupun kredit kepada masyarakat ataupun sektor swasta akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Penyaluran pembiayaan atau kredit memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan, yakni melalui laba perbankan. Hubungan tersebut bersifat negatif dengan tingkat signifikansi 1% ($p < 0,01$).

Hasil ini semakin menguatkan posisi perbankan sebagai perusahaan yang bertugas memberikan stimulan atau suntikan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui bidang usahanya, yakni melalui sektor ekonomi.

Supply-Leading Finance Theory merupakan teori klasik yang pada awalnya diperuntukkan untuk menstimulasi pertumbuhan sektor pertanian di mana pada masa silam mengalami kemunduran dikarenakan kurangnya kemampuan untuk memenuhi modal produksi (Robinson, 2001, p. 138). Dengan adanya pembiayaan ringan untuk petani maka diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pada akhirnya akan memperbaiki

kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Konsep ini kemudian diimplementasikan untuk sektor-sektor lainnya (Robinson, 2001, p. 141), di mana pada penelitian ini menunjukkan bahwa stimulus perbankan syariah terbukti mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pola ini sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang di mana pada umumnya memang membutuhkan lebih banyak modal atau investasi.

Dampak pembiayaan atau kredit terhadap pembangunan berkelanjutan sangat signifikan, serta berpengaruh positif. Hal ini sesuai dengan perkiraan yang seharusnya, yakni berdasarkan prinsip kemaslahatan. Berdasarkan teori yang ada, adanya stimulan dari bantuan dana untuk masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat atau dalam hal ini pembangunan berkelanjutan negara. Hasil menunjukkan bahwa meningkatkan kredit yang disalurkan oleh bank cenderung meningkatkan nilai pembangunan berkelanjutan negara.

Kontribusi penyaluran kredit terhadap SDGs melalui laba perbankan yang bersifat negatif semakin menekankan bahwa perbankan perlu menuntut laba perusahaan yang cukup (tidak terlalu tinggi) untuk menstimulan ekonomi rakyat. Kredit secara langsung memang berpengaruh positif terhadap SDGs. Tetapi melalui Profits pengaruhnya adalah negatif. Karena sedikitnya laba yang diminta untuk bank atas penyaluran kredit.

Bertambah credit yg di salurkan membuat laba meningkat, tetapi prosentase kenaikan penyaluran kredit lebih besar dari prosentase kenaikan profit, sehingga berhubungan negatif. Namun dampak negatif ini karena Bank memiliki kebijakan terhadap peningkatan SDGs atau kesejahteraan masyarakat

dalam hal ini adalah nasabah yg diberi pembiayaan. Karena semakin kecil laba yang diminta bank (perusahaan), maka semakin kecil beban masyarakat (cost of capitalnya), sehingga dananya bisa digunakan untuk sektor riil.

4.3. Pengaruh Moderasi Kualitas Pembiayaan antara Laba Perbankan dengan SDGs

Hipotesa awal menduga bahwa pembatasan laba yang diminta bank dapat meningkatkan SDGs, dengan dimoderasi oleh kualitas pembiayaan yang baik. Pengendalian laba tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan yang nonlinier antara peningkatan laba dengan dampaknya pada SDGs. Dengan perolehan laba pada tingkat tertentu, maka bank dinilai sebagai perusahaan yang tidak menuntut laba maksimal, dengan dasar sebagai stimulan peningkatan perekonomian negara melalui pembiayaan yang murah dan terjangkau.

Adapun laba yang tidak maksimal tersebut diimbangi dengan kualitas pembiayaan atau kualitas kredit yang baik. Sehingga dapat menghindari kesalahan intepretasi bahwa laba yang tidak maksimal tersebut memang bukan disebabkan oleh kualitas kredit yang sedang tidak baik.

Berdasarkan Gambar 3.2, diketahui bahwa laba secara aktif mempengaruhi nilai tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni dengan tingkat signifikansi 1% ($p < 0,01$).

Adapun merujuk pada hasil moderasi oleh kualitas pembiayaan (NPF/NPL), menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan/kredit mampu mengendalikan laba yang tinggi, dalam upaya meningkatkan SDGs. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaruh

negatif yang signifikan kualitas pembiayaan dalam moderasi laba perbankan terhadap SDGs.

Pengendalian laba merupakan salah satu manifestasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian studi ini membuktikan bahwa pengendalian laba (tidak berorientasi pada laba maksimal) adalah bentuk manifestasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada perbankan di Indonesia, kualitas kredit cenderung memperkuat fakta bahwa rendahnya laba bank dikarenakan adanya orientasi sosial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kualitas kredit dapat mengukur apakah laba rendah yang diperoleh bank dikarenakan upaya menstimulan perekonomian masyarakat, atau karena kondisi kredit yang sedang buruk. Laba yang rendah disertai kualitas kredit yang buruk (NPF yang tinggi) cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan menjadi semakin buruk. Karena kondisi pasar yang juga sedang buruk (banyaknya kredit macet). Karena itu laba rendah yang tercipta adalah karena kredit macet yang banyak.

Adapun laba yang rendah disertai dengan kualitas kredit yang baik (NPF yang kecil), menunjukkan dampak destruksi paling kecil terhadap SDGs (NPF yang kecil), serta menguatkan fakta bahwa laba rendah perbankan memang berorientasi pada meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan negara. Terlebih, peran dummy syariah yang memoderasi positif pengendalian laba (laba yang rendah) terhadap SDGs semakin menekankan perbedaan kontribusi antara bank syariah dengan bank

konvensional, di mana bank syariah memiliki dampak destruktif yang lebih kecil dibanding bank konvensional.

Rendahnya laba yang diperoleh pihak perbankan, tidak sekedar mengindikasikan adanya tujuan perusahaan untuk menstimulan pembangunan negara, tetapi ada indikasi lain seperti kegagalan perbankan dalam menjaga kualitas kredit yang diberikan. Sehingga laba rendah yang diperoleh bisa jadi dikarenakan adanya kredit macet. Studi ini mampu mendiferensiasikan apakah pengendalian laba oleh bank adalah karena orientasi sosial atau dikarenakan kondisi pasar yang buruk.

Kualitas kredit yang baik ditentukan oleh pemahaman dan pengelolaan yang baik oleh pegawai dan pejabat yang menangani pembiayaan tersebut, yang mencakup, antara lain tentang tujuan dan prosedur pembiayaan, perencanaan, dan strategi pembiayaan, pengelolaan, dan pemantauan pembiayaan, serta pengawasan pembiayaan (Biyantoro & Ghoniyah, 2019). Karena itu, bisnis kredit perbankan harus diorganisasikan sedemikian rupa, sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan *best practices* yang telah diterapkan secara internasional dan terbukti keandalannya (Indonesian Bankers Association, 2015, p. 3).

Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya di mana kualitas pembiayaan melemahkan interpretasi bahwa cukupnya laba perbankan syariah merupakan itikad bank untuk mendorong pertumbuhan pembangunan berkelanjutan (Ghoniyah & Hartono, 2019a). Koefisien moderasi yang positif membuat kualitas pembiayaan tidak dapat mendiferensiasi

apakah laba rendah bank syariah dikarenakan orientasi sosial, atau dikarenakan kondisi pasar yang sedang buruk.

Analisa mendalam menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah lebih diorientasikan pada penyaluran sektor riil, dengan akad kerjasama (loss and profit sharing). Sementara bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam bisnis kredit mereka, juga merambah investasi pada sektor keuangan, pasar uang, dan valas. Dengan kata lain, ada kecenderungan bank syariah bermain dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Sehingga bank syariah masih memiliki tugas untuk memperbaiki manajemen risiko yang dimiliki terlebih dahulu (Ghonyah & Hartono, 2019a, p. 105).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Keempat hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima. Hipotesis pertama tentang adanya perbedaan kontribusi bank syariah dengan bank konvensional terhadap SDGs dibuktikan dengan memoderasi peran laba terhadap SDGs. Kedua jenis bank memiliki pengendalian laba (laba yang cukup/rendah) untuk menstimulan pembangunan negara, akan tetapi bank syariah memiliki dampak destruktif yang lebih kecil (lebih baik). Pada hipotesis kedua, penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan mampu meningkatkan pembangunan negara yang berkelanjutan secara langsung. Pada hipotesis ketiga, dampak kredit tersebut direfleksikan melalui rendahnya laba (pengendalian laba) yang diminta perusahaan untuk menstimulan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun pada hipotesis keempat, membuktikan bahwa kualitas pembiayaan mampu mendiferensiasi serta membuktikan bahwa apakah laba rendah yang diperoleh bank dikarenakan oleh orientasi sosial untuk pembangunan berkelanjutan, atau dikarenakan sedang buruknya kondisi pasar sehingga banyak kredit yang sedang macet.

5.2. Implikasi Teoritis

Pada konteks akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pembaharuan teori serta perluasan sudut pandang dalam menilai laba suatu perusahaan terlebih perusahaan perbankan. Di mana pada tingkat laba tertentu dapat

membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk menjaga bisnis tetap berlangsung (*business sustainability*), tetapi juga adanya orientasi sosial yang tinggi.

Sementara pada tingkat laba tertentu yang cenderung tinggi, mengindikasikan adanya unsur keegoisan perusahaan untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, sehingga cenderung memberikan dampak destruktif pada sosial. Studi ini juga mendukung Undang-Undang bahwa perbankan memiliki tujuan sosial di atas tujuan pribadi yang bersifat materiil.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memelopori perubahan paradigma orientasi suatu entitas agar tidak hanya menjadikan kepentingan materiil seperti laba sebagai fokus utama, tetapi juga menjadikan tujuan kemanusiaan seperti sosial dan lingkungan sebagai poin-poin yang sama pentingnya dengan tujuan ekonomi.

Penelitian sebelumnya terkait tema yang sama membuktikan adanya kesesuaian tujuan *falah bank syariah* dengan pembangunan berkelanjutan, hal tersebut dapat dibuktikan pada penelitian yang juga melibatkan bank konvensional. Hal ini semakin menguatkan bahwa secara prinsipil terdapat perbedaan pengaruh antara bank syariah dengan bank konvensional.

Penelitian ini dapat membuktikan hal tersebut dengan menjadikan *dummy sharia* sebagai variabel moderasi atau variabel penguat atau pelemah. Tetapi belum dapat membuktikan perbedaan tersebut secara mutlak. Hal ini dikarenakan pada realitanya kapitalisasi pasar oleh perbankan syariah masih sangat rendah, serta kibat kebijakan perbankan syariah yang harus menstandarisasi diri dengan format dari bank

Indonesia, yakni masih berkiblat pada tingkat suku bunga (mengkonfersi keuntungan atau tingkat bagi hasil dalam bentuk *interest rate*).

Dengan demikian, perlu pengembangan keilmuan lebih mendalam terkait kebijakan perbankan syariah secara independen, sehingga dapat menjadi pedoman kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

5.3. Implikasi Manajerial

Manfaat manajerial pada penelitian ini ialah agar para pemegang kepentingan semakin melihat pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah tiga pilar yang saling berdampingan sehingga ketiga pilar tersebut haruslah dicapai dan diperhatikan secara seksama dan komprehensif. Hal ini pun kembali mengingatkan para pemangku kepentingan termasuk praktisi terkait tujuan mulia adanya suatu entitas (dalam hal ini perbankan). Dengan demikian, pada akhirnya tujuan berkelanjutan suatu perusahaan pun dapat tercapai dikarenakan pola bisnis serta orientasi bisnis yang telah memperhatikan unsur lingkungan dan sosial selaku media bisnis, tetap ada dan terjaga.

Penelitian sebelumnya terkait tema yang sama membuktikan adanya kesesuaian tujuan falah bank syariah dengan pembangunan berkelanjutan, meski hanya sebagai unsur diferensiasi, tetapi bukan pembuktian adanya perbedaan secara mutlak. Perbankan konvensional selaku lembaga keuangan yang menguasai pasar, memiliki orientasi yang lebih rendah dalam upaya mendistribusikan kredit di sektor riil (tingkat destruktif yang lebih tinggi). Hal ini menjadi pekerjaan rumah

pemerintahan dalam merumuskan serta meluruskan kembali orientasi akhir perusahaan perbankan agar sesuai dengan dasar didirikannya perusahaan perbankan tersebut.

Adapun bank syariah yang memiliki implikasi lebih ramah dibanding bank konvensional, dapat menjadi acuan dalam penetapan tujuan bisnis, serta penerapan tujuan bisnis (tujuan sosial) tersebut dalam setiap kebijakan perbankan. Seperti kebijakan penyaluran dana yang dominan untuk sektor riil. Meski demikian, manajemen risiko yang kurang rapi oleh bank syariah menjadi catatan baik Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah, serta instansi itu sendiri, untuk meningkatkan kualitas internal perusahaan. Sehingga bank syariah pun dapat menjadi perusahaan yang *sustain*.

5.4. Disclaimer

Business Sustainability masih menjadi permasalahan pada perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan usia bank syariah di Indonesia yang masih muda diperbandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah masih harus memperbaiki manajemen bisnis yang dimiliki untuk mencapai business sustainability, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pembangunan berkelanjutan negara. Karena itu perlu adanya kajian lebih mendalam terkait business sustainability tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abusharbeh, M. T. (2017). The Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: Empirical Analysis from Palestinian Economy. *Journal of Emerging Issues in Economics, Finance, and Banking*, 6(2), 978–979. Retrieved from www.globalbizresearch.org
- Acemoglu, D. (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. New Jersey: Princeton University Press. Retrieved from <https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2016/06/acemoglu-2007.pdf>
- Adekola, O. A. (2016). The Effect of Banks Profitability on Economic Growth in Nigeria. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 18(3), 1–09. <https://doi.org/10.9790/487X-18320109>
- Agza, Y., & Darwanto. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Pembiayaan Rakyat Syariah. *IQTISHADIA*, 10(1), 228–248. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2550>
- Al-abadallat, A. Z. (2017). The Role of the Jordanian Banking Sector in Economic Development. *International Business Research*, 10(4), 139. <https://doi.org/10.5539/ibr.v10n4p139>
- Al Karim, R., & Alam, T. (2013). An Evaluation of Financial Performance of Private Commercial Banks in Bangladesh: Ratio Analysis. *Journal of Business Studies Quarterly*, 5(2), 65–77. Retrieved from http://jbsq.org/wp-content/uploads/2013/12/December_2013_5.pdf

- Alkhazaleh, A. M. K. (2017). Problems and Perspectives in Management. *Problems and Perspectives in Management*, 15(2), 55–64. [https://doi.org/10.21511/ppm.15\(2\).2017.05](https://doi.org/10.21511/ppm.15(2).2017.05)
- Almanaseer, D. S. R., & AlSlehat, D. Z. A. (2016). The Impact of Financing Revenues of the Banks on Their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islami Banks. *European Journal of Business and Management*, 8(12), 195–202. Retrieved from <https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/29810>
- Arreymbi, J., & A. Agbor, E. (2009). Information Communications Technology (ICT) Effect on Sustainable Development in Cameroon’s Fragile Economy. *Journal of Sustainable Development*, 1(1), p75. <https://doi.org/10.5539/jsd.v1n1p75>
- Asheghian, P. (2016). GDP growth determinants and foreign direct investment causality: the case of Iran. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 25(6), 897–913. <https://doi.org/10.1080/09638199.2016.1145249>
- Ávila, D. R. De. (2003). *Finance and Growth in the EU: New Evidence from the Liberalisation and Harmonisation of the Banking Industry*. Brussels. Retrieved from http://ssrn.com/abstract_id=457534.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistical Yearbook of Indonesia 2018*. Jakarta. <https://doi.org/ISSN: 0126-2912>
- Biyantoro, A., & Ghoniyah, N. (2019). SHARIA COMPLIANCE AND ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE | TRIKONOMIKA. TRIKONOMIKA, 18(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/trikononika.v18i2.1465>**

- Cahyani, S. M. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Jual-Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, NPF, dan Sensitivitas Inflasi terhadap ROA BUS*. Surabaya. Retrieved from http://eprints.perbanas.ac.id/1561/1/ARTIKEL_ILMIAH.pdf
- Central Bureau of Statistics. (2016). *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Kajian Indikator Lintas Sektor*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OWEwMDJmMDA2N2M4OWU1MTFmMDQyYzEz&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1Ym xpY2F0aW9uLzIwMTcvMDIvMDEvOWEwMDJmMDA2N2M4OWU1MTFmMDQyYzEzL2thamlhbi1pbmRpa2F0b3ItbGludGFzLXNla3Rvci0tcG90cmV0LWF3YWwtdHVqdWFu>
- Chalid, P. (2010). Modul 1, Teori Pertumbuhan, Teori dan Isu Pembangunan.
- Chintaman, S. A. (2014). A Comparative Study of CSR Practices of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC Region. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1). Retrieved from www.ilo.org,
- Clayton, A. H., Pinnock, F. H., & Ajagunna, I. (2014). Tourism in a transforming world economy – the impacts of the brave new world. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 6(2), 191–196. <https://doi.org/10.1108/WHATT-01-2014-0007>
- Desai, B. M., & Mellor, J. W. (1993). Food policy review synopsis 1. In *Institutional Finance for Agriculture Development, an Analytical Survey of Critical Issues*. Washington, D.C.: International Food Policy Research

Institute (IFPRI). Retrieved from <http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/125521>

Eriksson, C. (1996). Economic Growth with Endogenous Labour Supply. *European Journal of Political Economy*, 12(3), 533–544. [https://doi.org/10.1016/S0176-2680\(96\)00014-6](https://doi.org/10.1016/S0176-2680(96)00014-6)

Ferdyant, F., Ratna Anggrani ZR, & Erika Takidah. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 134–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3584>

Financial Ferivices Authority. (2017). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Retrieved 1 June 2018, from <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx>

Financial Ferivices Authority. (2018). *Statistik Perbankan Indonesia per 31 Desember 2017*. Jakarta. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx>

Firdaus, H. R., & Ariyanti, M. (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabetta.

Fosu, P. (2019). The Determinants of Economic Growth: The Role of Infrastructure. Retrieved from <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93101/>

Ghonyah, N., & Aryani, D. (2018). ANALISIS BUSINESS SUSTAINABILITY PADA PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA. In *Forum Manajemen Indonesia (FMI) ke-10*. Sumatera Selatan: Forum Manajemen Indonesia. Retrieved from <http://fmi.or.id/downloads/>
https://www.researchgate.net/publication/341232364_ANALISIS_BUSINESS_SUSTAINABILITY_PADA_PERBANKAN_SYARIAH_DI_INDONESIA

Ghoniya, N., & Hartono, S. (2013). *Model Penerapan Islamic Corporate Governance yang Didukung Social Entrepreneurship pada UMKM*. Semarang. Retrieved from <http://research.unissula.ac.id/file/penelitian/210488016/6575Doc1.pdf>

Ghoniya, N., & Hartono, S. (2019a). The Contribution of Islamic Banks towards the Achievement of Sustainable Development Goals: The Case of Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 65(2), 93–110. <https://doi.org/10.7454/efi.v65i2.620>

Ghoniya, N., & Hartono, S. (2019b). THE ROLE OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE IN PREVENTING FRAUD. In *AICIF 7th (ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance)*. Gontor: UNIDA Gontor Press. Retrieved from <https://drive.google.com/file/d/1ZOHIUfMV7je8qyFlfyoQw0Hlr2EqM9Jn/view> ATAU https://www.researchgate.net/publication/341232113_THE_ROLE_OF_ISLAMIC_CORPORATE_GOVERNANCE_IN_PREVENTING_FRAUD#fullTextFileContent

Ghoniya, N., Mutamimah, & Amilahaq, F. (2020). Minimizing Frauds on the Indonesian Islamic Banks (pp. 221–225). Atlantis Press.

<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200410.034>

- Ghonyah, N., & Setyowati, A. R. (2019). Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum di Indonesia. In *Forum Manajemen Indonesia (FMI) ke-11*. Samarinda: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Retrieved from <http://fmi.or.id/downloads/>
https://www.researchgate.net/publication/341232254_FACTOR_PENENTU_PENYALURAN_KREDIT_PERBANKAN_PADA_BANK_UMUM_DI_INDONESIA
- Ghonyah, N., & Wakhidah, N. (2012). PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DARI SISI PENAWARAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *DHARMA EKONOMI*, 19(36). Retrieved from <http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/DE/article/view/42>
- Goaied, M., & Sassi, S. (2010). *Financial Development and Economic Growth in the MENA Region: What about Islamic Banking Development*. Retrieved from <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2010/03/Financial-Development-and-Economic-Growth-in-the-MENA-Region-What-about-Islamic-Banking-Development.pdf>
- Goaied, M., & Sassi, S. (2011). Financial Development, Islamic Banking and Economic Growth: Evidence from MENA Region. *International Journal of Business and Management Science*, 4(2), 105–128. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2890991
- Habibullah, M. S., & Eng, Y.-K. (2006). Does Financial Development Cause Economic Growth? A Panel Data

Dynamic Analysis for the Asian Developing Countries. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 11(4), 377–393. <https://doi.org/10.1080/13547860600923585>

- Haq, R. N. A. (2015). Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Pebarnas Review*, 1(1). Retrieved from <http://jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/download/12/11>
- Harahap, S. S. W., & Yusuf, M. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE-USakti.
- Indonesian Bankers Association. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesian Bankers Association. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indriana, D., & Zuhroh, I. (2012). Analisis Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah tahun 2006-2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 121–136. <https://doi.org/10.22219/JEP.V10I2.3723>
- Janusz, R. (2016). Determinants of the EU sustainable development policy effectiveness. DEA approach. *Economic and Environmental Studies*, 16(4(40)), 551–576. Retrieved from <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.de-sklight-db730aba-4ce7-4ceb-b0ac-e5a1deb0cb6b>
- Jaurino, J., & Wulandari, R. (2017). The Effect of Mudharabah and Musyarakah on The Profitability of Islamic Banks. In *The 3rd PIABC (Parahyangan International Accounting and Business Conference)* (Vol. 0). Retrieved from <http://journal.unpar.ac.id/index.php/piabc/article/view/245>

- Josephine, O. N., Oladele Akeeb O., & Makwe Emmanuel U. (2016). Bank Liquidity and Economic Growth of Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(14). Retrieved from <https://iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/32102>
- Jusoh, W. N. H. W., & Ibrahim, U. (2017). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF ISLAMIC BANK'S PRACTICES: AN EXPLORATORY STUDY. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1(2), 95–109. <https://doi.org/10.30659/IJIBE.1.2.95-109>
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan, Edisi 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Klein, P.-O., & Weill, L. (2018). Bank Profitability and Economic Growth. *BOFIT Discussion Paper No. 15/2018*. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3207171
- Law No.10 of 1998 - Amendment to Law No. 7 Yr 1992 concerning Banking, Pub. L. No. 10, The Unitary State of the Republic of Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia) (1998). Indonesia: Undang-Undang. Retrieved from http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm
- Mamman, A., & Alhaji Hashim, Y. (2013). Impact of private sector credit on the real sector of Nigeria. *International Journal of Business and Social Research (IJBSR)*, 3(5), 105–116. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18533/ijbsr.v3i5.11>
- Mohammadi, F., Emadzadeh, M., & Ansari, A. (2012). The

Major Determinants of Sustainable Development in Selected Pacific, East and West Asian Countries. *University of Isfahan*, 39(2), 55–62. <https://doi.org/10.22108/IES.2634.15546>

Muhamad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqih & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muna, A., & Ghoniyah, N. (2013). ANALISIS TINGKAT BAGI HASIL, TINGKAT SUKU BUNGA DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP JUMLAH DEPOSITO DAN JUMLAH TABUNGAN MUDHARABAH PADA BMI DI INDONESIA. *Majalah Ilmiah FE USM (Solusi)*, 12(2). Retrieved from <http://research.unissula.ac.id/pages/publikasi.php?id=MTczNWFwYXlhZW5rcmlwc2lueWE/>

Murerwa, C. B. (2015). *Determinants of Banks' Financial Performance in Developing Economies: Evidence from Kenyan Commercial Banks*. Afrika. Retrieved from <http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/705/DETERMINANTS OF BANK PERFORMANCE 2 07 15 .pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Nugroho, Y. (2017). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, Memikirkan Mekanisme Pendanaan*. Jakarta. Retrieved from https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Yanuar_Nugroho_-_Kantor_Staff_Presiden.pdf

Paul, D. I., & Uhomobhi, J. (2012). Solar power generation for ICT and sustainable development in emerging economies. *Campus-Wide Information Systems*, 29(4), 213–225. <https://doi.org/10.1108/10650741211253813>

Pratiwi, D. D. (2012). *Pengaruh CAR, BOPO, NPF Dan FDR*

Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 – 2010). Semarang.

- Purboastuti, N., Anwar, N., & Suryahani, I. (2015). Pengaruh Indikator Utama Perbankan terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah. *JEJAK Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan (Journal of Economics and Policy)*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3850>
- Raimi, L., & Ogunjirin, O. D. (2012). Fast-tracking sustainable economic growth and development in Nigeria through international migration and remittances. *Humanomics*, 28(3), 209–219. <https://doi.org/10.1108/08288661211258101>
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.15294/AAJ.V3I4.4208>
- Robinson, M. S. (2001). *The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the Poor*. Washington, D.C.: World Bank. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28956>
- Samad, K. A., Said, R., Kamarulzaman, M. H., Mahshar, M., & Nasir, I. N. M. (2015). Exploring the Zakat Payment and Firm's Performance of Islamic Banks in Malaysia. In *The 6th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility 2015 (iConGFESR 2015)*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/317558833_Exploring_the_Zakat_Payment_and_Firm's_Performance_of

Islamic_Banks_in_Malaysia

- Stanny, M., & Czarnecki, A. (2010). Level and determinants of sustainable rural development in the Region of Green Lungs of Poland. In *Rural Areas and Development* (pp. 197–212). Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute. Retrieved from <https://ageconsearch.umn.edu/record/139802>
- Tabash, M. I., & Suhaib Anagreh. (2017). Do Islamic Banks Contribute to Growth of The Economy? Evidence from United Arab Emirates (UAE). *Banks and Bank System*, 12(1), 113–118. [https://doi.org/10.21511/bbs.12\(1-1\).2017.03](https://doi.org/10.21511/bbs.12(1-1).2017.03)
- Wang, C., Han, X., Xin, S., Liu, D., Xu, M., Ma, J., & Yu, Y. (2019). An Empirical Analysis of Denmark's Energy Economy and Environment and Its Sustainable Development Policy. *Journal of Sustainable Development*, 12(2), 29. <https://doi.org/10.5539/jsd.v12n2p29>
- Zamzami, Z. Z. (2011). Model Kemitraan dalam Pola Pembiayaan Perkebunan Sawit. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(3). Retrieved from <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/308060>